



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024



**Jl. Jend. Sudirman Kel. Bintang Kec. Dumai Kota
Dumai Riau 28814**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
DAFTAR ISI		i
DAFTAR LAMPIRAN		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GRAFIK		iv
DAFTAR GAMBAR		v
KATA PENGANTAR		vi
RINGKASAN EKSEKUTIF		vii
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Isu-isu Strategis	4
1.5	Cascading Kinerja	5
1.6	Peta Proses Bisnis	6
1.7	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS		8
2.1	Rencana Strategis	8
2.2	Tujuan dan sasaran	9
2.3	Kebijakan, Strategi dan Program	12
2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS		19
A. Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian		21
3.1	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	21
3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	25
3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra	27
3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional	29
3.5	Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi	30

3.6	Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	36
3.7	Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya	38
3.8	Prestasi dan Penghargaan	39
B. REALISASI ANGGARAN		40
BAB IV PENUTUP		43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 beserta lampiran perubahan
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2024
7. Penghargaan (jika ada)

DAFTAR TABEL

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tabel 1.1 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian pada Tahun 2024	ii
Tabel 1.2 Program Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2024	ii
Tabel 1.3 Program kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2024	ii
Tabel 1.4 Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024	ii
Tabel 1.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2024	ii
Tabel 1.6 Efisiensi Penggunaan Anggaran Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2024	iii

BAB I PENDAHULUAN

1

TABEL 1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	9
---	---

BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS

13

TABEL 2.2 Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024	16
TABEL 2.3.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai	18
TABEL 2.4.1 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024	21
TABEL 2.4.2 Program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai	22
TABEL 2.4.3 Program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai	23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS

24

TABEL 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	25
TABEL 3.2 Atribut Capaian Indikator Kinerja	26
TABEL 3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu	30
TABEL 3.4.1 Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	37
TABEL 3.6	44
TABEL 3.8 Prestasi dan Penghargaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Struktur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	4
Gambar 1.5 Cascading Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	6
Gambar 1.6 Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	7
Gambar 2.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	14

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan koperasi dan usaha mikro, dan Bidang Perindustrian Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai. Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota DumaiJanuari 2025
KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI



SEPRANEF SYAMSIR, AP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740925 199502 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan koperasi dan usaha mikro, dan Bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai maka sebagai unsur teknis, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai menjalankan fungsi :

1. Pelaksanaan Kewenangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
2. Perumusan kebijaksanaan dan mengkoordinasi penyelenggaraan dibidang koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
3. Pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
4. Pembinaan dan pemberian dukungan permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan pemasaran hasil usaha koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;

5. Peminaan dan pengawasan penyelenggaraan koperasi, pengusaha kecil dan menengah; dan
6. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai melaksanakan MISI yang ke 1 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu “Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri “ dan SASARAN yang ke 1 dan 2 yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu “ Terwujudnya pemerataan pendapatan koperasi dan UKM “ dan “Meningkatkan kontribusi sektor Industri pada PDRB Kota Dumai

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai 2021 – 2026 telah menetapkan 2 (Dua) Tujuan dengan 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 8 (Delapan) Program, 17 (Tujuh Belas) Kegiatan dan 39 (Tiga puluh sembilan) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024 antara lain:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 5 Sub kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3 Sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan 1 Sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 8 Sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 Sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 4 Sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa surat menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 4 Sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

II. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

1. Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan :

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penilaian kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

III. Program Pendidikan dan latihan perkoperasian

1. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan :

- Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi

IV. Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi

1. Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota dengan 1 sub kegiatan :

- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya.

V. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan 5 sub kegiatan :

- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- Fasilitasi Sertifikasi dan standardisasi usaha Mikro
- Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
- Penyusunan Basis Data usaha Mikro

VI. Program Pengembangan UMKM

1. Kegiatan Pengembangan Usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan 1 sub kegiatan :
 - Produksi dan Pengolahan Pemasaran, sumber daya Manusia, serta Desain dan teknologi

VII. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

1. Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota dengan 2 sub kegiatan :
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.

VIII. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan :
 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Nasional (SIINas).

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai pada Tahun 2024 mengalami 2 kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2024 adalah sebagai berikut : (apabila mengalami perubahan)

Tabel 1.1
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian pada Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	Persentase Koperasi aktif	71%
		Persentase Usaha Mikro Kecil	55 %
2.	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB	65,9%
		Persentase Cakupan Kelompok Bina Pengrajin	14%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 7.397.167.500. (Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk melaksanakan 7 (Tujuh) Program Kerja antara lain :

Tabel 1.2
Program Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.978.411.350	APBD
2.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 150.000.000	APBD
3.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 241.810.000	APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 100.000.000	APBD
5.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 633.705.900	APBD
6.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 161.185.350	APBD
7.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 125.000.000	APBD
J U M L A H		Rp. 7.397.167.500	APBD

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Program Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.174.187.520	APBD
2.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 150.000.000	APBD
3.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 241.810.000	APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 100.000.000	APBD
5.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 802.937.200	APBD
6.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 161.185.350	APBD
7.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 130.000.000	APBD
8.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 50.000.000	APBD
J U M L A H		Rp. 7.810.120.070	APBD

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4

Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2024	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	Persentase Koperasi aktif	71%	62,27%	92,32%	Sangat Berhasil	-	-	-
		Persentase Usaha Mikro Kecil	55%	25%	45,45%	-	-	-	Tidak Berhasil
2.	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB	65,9%	60,70%	92,11%	Sangat Berhasil			
		Persentase Cakupan Kelompok Bina Pengrajin	14%	10,78%	77,03%	-	-	Cukup Berhasil	-

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai selama tahun 2024 termasuk kategori 55% s.d < 70% (Cukup Berhasil) yaitu Cukup Berhasil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 7.810.120.070 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Tujuh Puluh Rupiah) bersumber dari APBD Anggaran tersebut terdiri dari

BELANJA OPERASI sebesar Rp. 7.676.841.220 (Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 133.278.850 (Seratus Tiga Puluh tiga Juta Dua ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)

1. Belanja Operasi	:	Rp.	7.676.841.220,00
2. Belanja Modal	:	Rp.	133.278.850,00
J u m l a h	:	Rp.	<u>7.810.120.070,00</u>

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Kota Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGE T	REALIS ASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALIS ASI	CAP AIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Mewujudkan Perekonomian yang mandiri masyarakat yang sejahtera							
Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat kota Dumai	Persentase Koperasi Aktif	71%	62,27%	92,32%			
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	55%	25%	45,45%			
Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	100%	100%	100%	6.174.187. 520	5.779. 002.524	93,60 %
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7,13%	12,12%	170%	150.000. 000	114.836 .600	76,56 %

Program Pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	23,55%	18,18%	77,20%	241.810.000	222.216.800	91,90%
Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	40%	18,18%	45,45%	100.000.000	90.441.512	90,44%
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	20%	12,5%	62,5%	802.937.200	521.499.513	64,95%
Program pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang dibina	5%	15,87%	317,46	161.185.350	122.172.300	75,80%
Tujuan : Mewujudkan Perekonomian yang mandiri masyarakat yang sejahtera							
Sasaran : Meningkatkan Perekonomian dan Daya saing daerah	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	65,90%	60,90%	92,41%			
	Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	14%	10,78%	77,03%			

Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Terselesainya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	100%	100%	100%	130.000. 000	101.130 .355	77,79 %
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data perusahaan industry kecil, menengah dan perusahaan kawasan	65%	65%	100%	50.000. 000	28.420. 000	56,84 %

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2024. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI	KETERANGAN
1.	Mewujudkan Perekonomian yang mandiri masyarakat yang sejahtera	Persentase Koperasi Aktif	62,27%	86,92%	CUKUP EFISIEN	Karena ada Beberapa Sub Kegiatan yang tunda bayar
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	25%	66,76%	KURANG EFISIEN	Karena ada Beberapa Sub Kegiatan yang tunda bayar

2.	Mewujudkan Perekonomian yang mandiri masyarakat yang sejahtera	Pesentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	92,41%	77,79%	CUKUP EFISIEN	Karena ada Beberapa Sub Kegiatan yang tunda bayar
		Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	10,78%	56,84%	KURANG EFISIEN	Karena ada Beberapa Sub Kegiatan yang tunda bayar

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Koperasi Aktif* yaitu ada 3 (tiga) Program yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

- ✚ Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan anggaran Rp. 150.000.000,00 dengan realisasi Rp. 114.836.600,00 atau 76,56% tingkat efisiensinya adalah 213,35% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (163,34%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (76,56%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**;
- Kegiatan : Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupate/Kota ada 2 (dua) sub kegiatan dengan anggaran Rp.150.000.000 dengan realisasi Rp. 114.836.600 atau 76,56 %
- ✓ Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000 dengan realisasi Rp. 45.949.000 atau 61,27%. Sub Kegiatan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan KSP/USP koperasi yang dilakukan oleh

pengurus dan pengelola, apakah pengelolaan koperasi telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja koperasi kedepannya, serta pembinaan terhadap koperasi sebanyak 40 (empat puluh) koperasi yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan se Kota Dumai, dengan hasil beberapa koperasi sudah melaksanakan RAT tapi belum menyampaikan Hasil Keputusan RAT dalam bentuk Berita Acara dan koperasi bersedia dilakukan penilaian kesehatan koperasi. dan Penilaian Kesehatan terhadap KSP/USP Koperasi sebanyak 40 (empat puluh) KSP/USP koperasi yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan se Kota Dumai berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, dengan hasil Koperasi yang mendapat predikat "SEHAT" sebanyak 21 (dua puluh satu) koperasi dan yang mendapat predikat "CUKUP SEHAT" sebanyak 19 (sembilan belas) koperasi.

- ✓ Sub Kegiatan : Penilaian kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000 dengan realisasi Rp. 68.887.600 atau 91,85%. Sub Kegiatan bertujuan untuk memberikan motivasi pada koperasi agar dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat serta mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu sebagai gambaran keberhasilan upaya pengembangan koperasi. serta Penilaian Koperasi Berprestasi sebanyak 20 (dua puluh) koperasi yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan se Kota Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor : 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award, Peringatan Hari

Koperasi Nasional tingkat Kota Dumai yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024 di Gedung Sri Bunga Tanjung / Pendopo dan penyerahan Piagam dan Hadiah kepada Juara Koperasi Berprestasi Tahun 2024, dan pemberian Penghargaan kepada 7 (tujuh) Koperasi Berprestasi yang mewakili 7 (tujuh) Kecamatan di Kota Dumai berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor : 844/868/2024 tentang Penetapan Koperasi Berprestasi Tahun 2024.

- ✚ Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan anggaran Rp. 241.810.000,00 dengan realisasi Rp. 222.216.800,00 atau 91,90% tingkat efisiensinya adalah 78,56% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (77,20%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (91,90%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- Kegiatan : Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/Kota ada 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran Rp. 241.810.000,00 dengan realisasi Rp. 222.216.800,00 atau 91,90%.
- ✓ Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi dengan anggaran sebesar Rp. 241.810.000,00 dengan realisasi Rp. 222.216.800,00 atau 91,90%. Sub Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengurus/pengelola koperasi tentang perkoperasian dan meningkatkan kualitas dan profesionalitas pengelolaan usaha Koperasi serta membentuk kader-kader koperasi yang tangguh, partisipatif dan berwawasan luas.
- ✚ Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi Rp. 90.441.512,00 atau 90,44% tingkat efisiensinya adalah 52,90% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (47,84%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (90,44%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**;

- Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota dengan anggaran Rp. 100.000.000 dengan realisasi Rp. 96.725.298 atau 96,73%.
- ✓ Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi Rp. 90.441.512,00 atau 90,44% . Sub Kegiatan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan serta motivasi keluarga/masyarakat agar dapat menjadi lapangan pekerjaan/berwirausaha pembuatan batik untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

2. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Usaha Mikro dan Kecil yaitu 2* (dua) Program yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

- ✚ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan anggaran Rp. 802.937.200,00 dengan realisasi Rp. 521.499.513,00 atau 64,95% tingkat efisiensinya (191,89%) adalah berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (64,95%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**;
- Kegiatan: Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan anggaran Rp. 802.937.200,00 dengan realisasi Rp. 521.499.513,00 atau 64,95%.
- ✓ Sub Kegiatan : Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro dengan anggaran Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi Rp. 2.985.000 atau 5,97%. Penyerapan anggaran pada sub kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro tidak mencapai target dikarenakan adanya **Pembayaran Tunda Bayar** pada tahun 2024. Sub kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya atau dengan beberapa perusahaan yang nantinya bias bermitra dengan pelaku usaha mikro kecil terkait dalam hal pemasaran, bantuan alat atau modal. Didalam pola kemitraan ini diharapkan juga dapat membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

- ✓ Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan anggaran *Rp. 92.176.400,00* dengan realisasi *Rp. 88.927.000* atau 96,47%. Penyerapan anggaran pada sub kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro tidak mencapai target dikarenakan adanya **Pembayaran Tunda Bayar** pada tahun 2024. Sub Kegiatan bertujuan untuk menambah wawasan, menanamkan sikap dan perilaku sebagai seorang wirausaha yang memiliki etika, mengetahui faktor pendorong berkembangnya sebuah usaha, sehingga mendorong para peserta pelatihan untuk menekuni profesi sebagai pelaku wirausaha, Untuk meningkatkan semangat, sikap, tingkah laku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi, Untuk menciptakan sesuatu yang lain dari orang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan yang efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
- ✓ Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi dan standardisasi usaha Mikro dengan anggaran *Rp. 75.000.000* dengan realisasi *Rp 71.800.000* atau 95,72%. Penyerapan anggaran pada sub kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro tidak mencapai target dikarenakan adanya **Pembayaran Tunda Bayar** pada tahun 2024. Sub Kegiatan bertujuan Untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan sertifikasi halal pada pelaku UMKM khususnya untuk pengolahan makanan produk UMKM, Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku UMKM untuk memproduksi dan menjual produk halal, dan Untuk mendukung percepatan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Kota Dumai.
- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Insfrastruktur Publik dengan anggaran *Rp. 366.000.000* dengan realisasi *Rp. 163.740.353* atau 44,74%. Penyerapan anggaran pada sub kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro tidak mencapai target dikarenakan adanya **Pembayaran Tunda Bayar** pada tahun 2024. Sub Kegiatan sebuah acara temporer yang menyediakan ruang bagi para pelaku UMKM untuk memamerkan dan menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen. Biasanya, bazar UMKM diadakan di tempat umum yang strategis, seperti lapangan terbuka, gedung pameran, atau pusat

perbelanjaan.

- ✓ Sub Kegiatan : Penyusunan Basis Data usaha Mikro dengan anggaran Rp. 219.760.800,00 dengan realisasi Rp. 194.047.160 atau 83,30%. Sub Kegiatan bertujuan Meningkatkan kemampuan umkm sehingga dapat bersaing dalam perdagangan bebas yang dihadapi, Terciptanya pola pembinaan umkm yang terintegrasi, Menumbuh dan meningkatkan kemampuan usaha mikro menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri sehingga dapat berkembang menjadi usaha kecil maupun menengah, Upaya meningkatkan peran umkm dalam Pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan.
- ✚ Program Pengembangan UMKM dengan anggaran Rp. 161.185.350 dengan realisasi Rp. 122.172.300 atau 75,79% tingkat efisiensinya (420%) berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (75,79%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**;
- Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Kecil dengan anggaran Rp. 161.185.350 dengan realisasi anggaran Rp. 122.172.300 atau 75,79%
- ✓ Sub Kegiatan : Produksi dan Pengolahan Pemasaran, sumber daya Manusia, serta Desain dan teknologi dengan anggaran Rp.130.410.000 dengan realisasi anggaran Rp.130.253.000 atau 99,88%. Sub Kegiatan bertujuan Meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha, Mempermudah akses informasi dan layanan, Meningkatkan kenyamanan pengguna, Menyediakan Solusi inovatif untuk masalah sehari –hari, Mendata pelaku usaha yang terdaftar di aplikasi digiloka, Mempermudah pelaku usaha yang bergabung dalam digiloka untuk memasarkan produk dengan mudah untuk mencapai target penjualan

3. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB yaitu 1 (satu) Program yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut:

- ✚ Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dengan anggaran Rp. 130.000.000,00 dengan realisasi Rp.101.130.355,00 atau 77,79%. tingkat efisiensinya (116,96%) berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (77,79%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**;
- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 130.000.000,00 dengan realisasi Rp.101.130.355,00 atau 77,79%.
- ✓ Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dengan anggaran Rp. 80.000.000,00 dengan realisasi Rp. 61.930.455,00 atau 77,41%. Penyerapan anggaran pada sub kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro tidak mencapai target dikarenakan adanya **Pembayaran Tunda Bayar** pada tahun 2024. Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk IKM melalui Peningkatan Desain Merk dan Kemasan agar mampu bersaing di pasaran, khususnya dalam menghadapi persaingan dan perdagangan bebas yang ada saat ini.
- ✓ Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan anggaran Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi Rp.39.199.900,00 atau 78,40%. Penyerapan anggaran pada sub kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro tidak mencapai target dikarenakan adanya **Pembayaran Tunda Bayar** pada tahun 2024. Sub kegiatan ini bertujuan Menumbuh kembangkan usaha industri kecil dan menengah Kota Dumai, Meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam produksi home industry kuliner tradisional melayu riau dumai, yang pada saat ini sangat minim, menambah lapangan usaha dan meningkatkan tambahan penghasilan masyarakat terutama bagi masyarakat usaha kecil menengah.

4. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 1 (satu) Program yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan anggaran Rp. 50.000.000 dengan realisasi anggaran Rp. 28.420.000,00 atau 56,84% tingkat efisiensinya adalah 76,38 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (77,03%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (56,84%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**;
 - Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi industri IUI, IPU, IUKI dan IPKIKewenangan Kab/Kota dengan anggaran Rp. 50.000.000 dengan realisasi anggaran Rp. 28.420.000,00 atau 56,84%
 - ✓ Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kab/Kota melalui SINas dengan anggaran Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi Rp. 28.420.000,00 atau 56,84%. Penyerapan anggaran pada sub kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro tidak mencapai target dikarenakan adanya **Pembayaran Tunda Bayar** pada tahun 2024. Sub kegiatan ini bertujuan Menumbuh kembangkan usaha industri kecil dan menengah Kota Dumai.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKIP**) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau persentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di

Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan koperasi dan usaha mikro, dan Bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah, Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

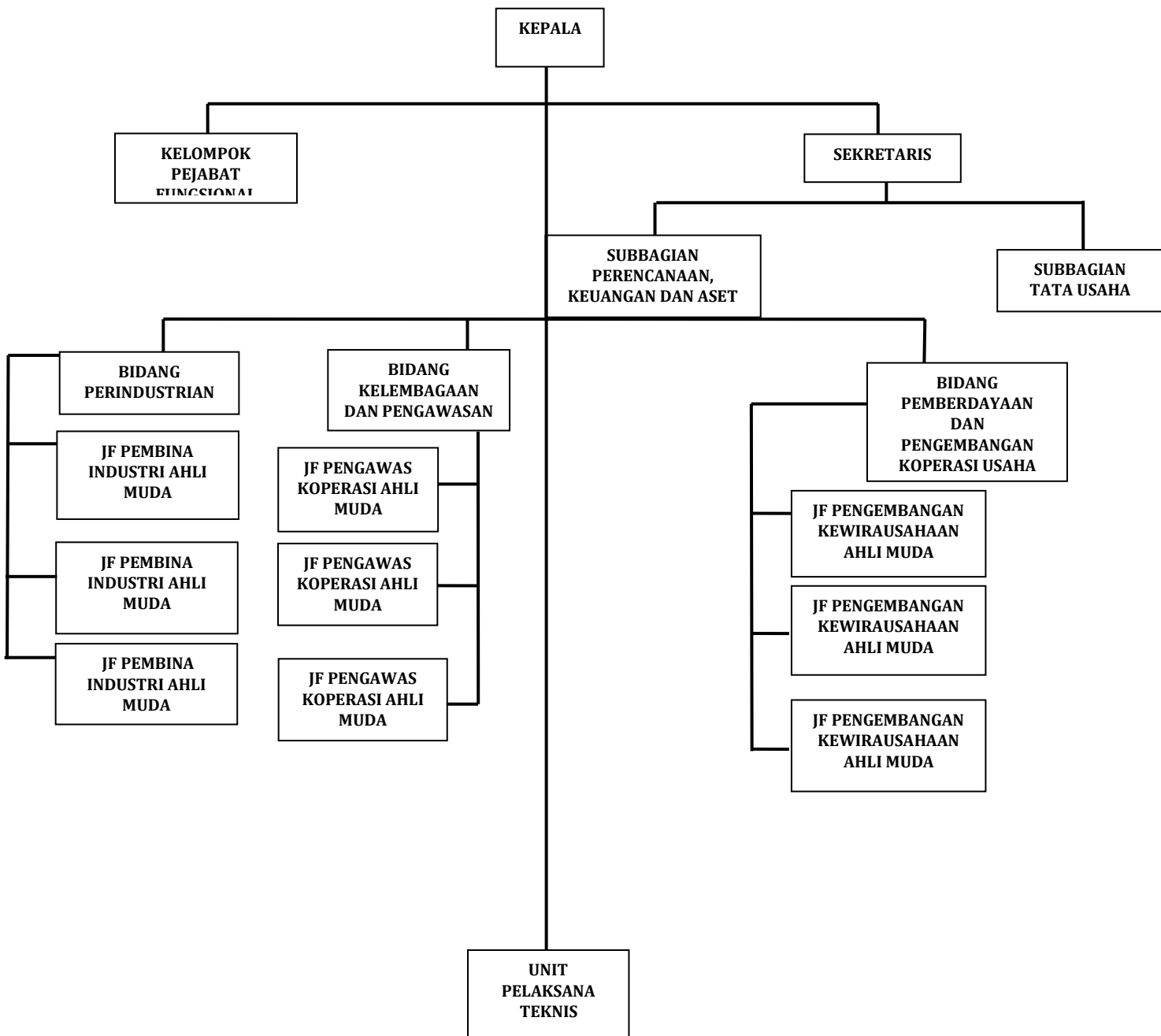
- 1 Pelaksanaan Kewenangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian ;
- 2 Perumusan kebijaksanaan dan mengkoordinasi penyelenggaraan dibidang koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
- 3 Pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
- 4 Pembinaan dan pemberian dukungan permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan pemasaran hasil usaha koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
- 5 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan koperasi, pengusaha kecil dan menengah; dan
- 6 Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan organisasi Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 - ❖ Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - ❖ Subbagian Tata usaha;
- c. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahi;
 - ❖ Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro membawahi:
 - ❖ Kelompok Jabatan Fungsional

- e. Bidang Perindustrian membawahi :
 - ❖ Kelompok Jabatan Fungsional
- f. UPT ;

Gambar 1.2.1
Struktur Organisasi
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian



1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2024, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

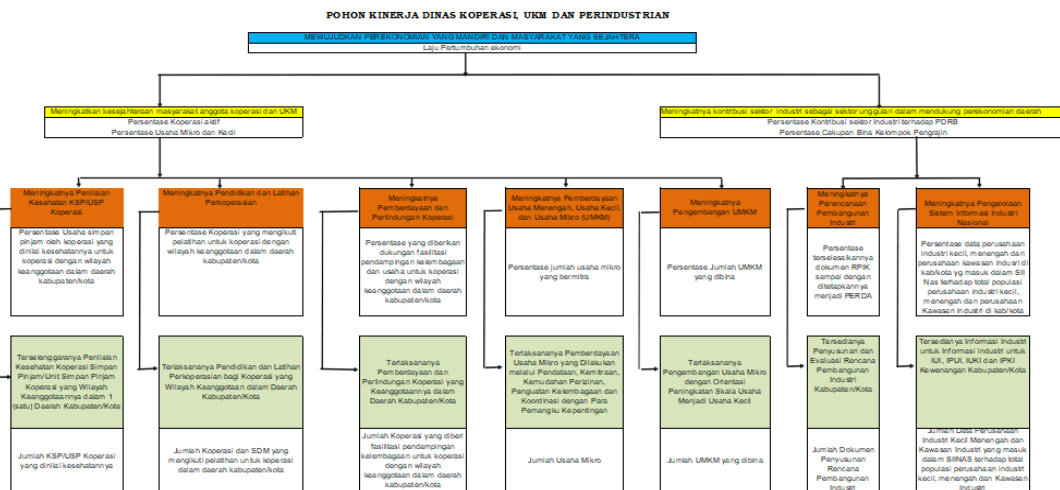
Isu strategis terkait dengan urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan yang perlu ditangani sbb:

1. Memperkuat koperasi dalam mendukung UMKM
2. Memperkuat UMKM melalui peningkatan kualitas SDM, networking, permodalan dan Daya saing produk
3. Meningkatkan peran sektor industri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.5.1

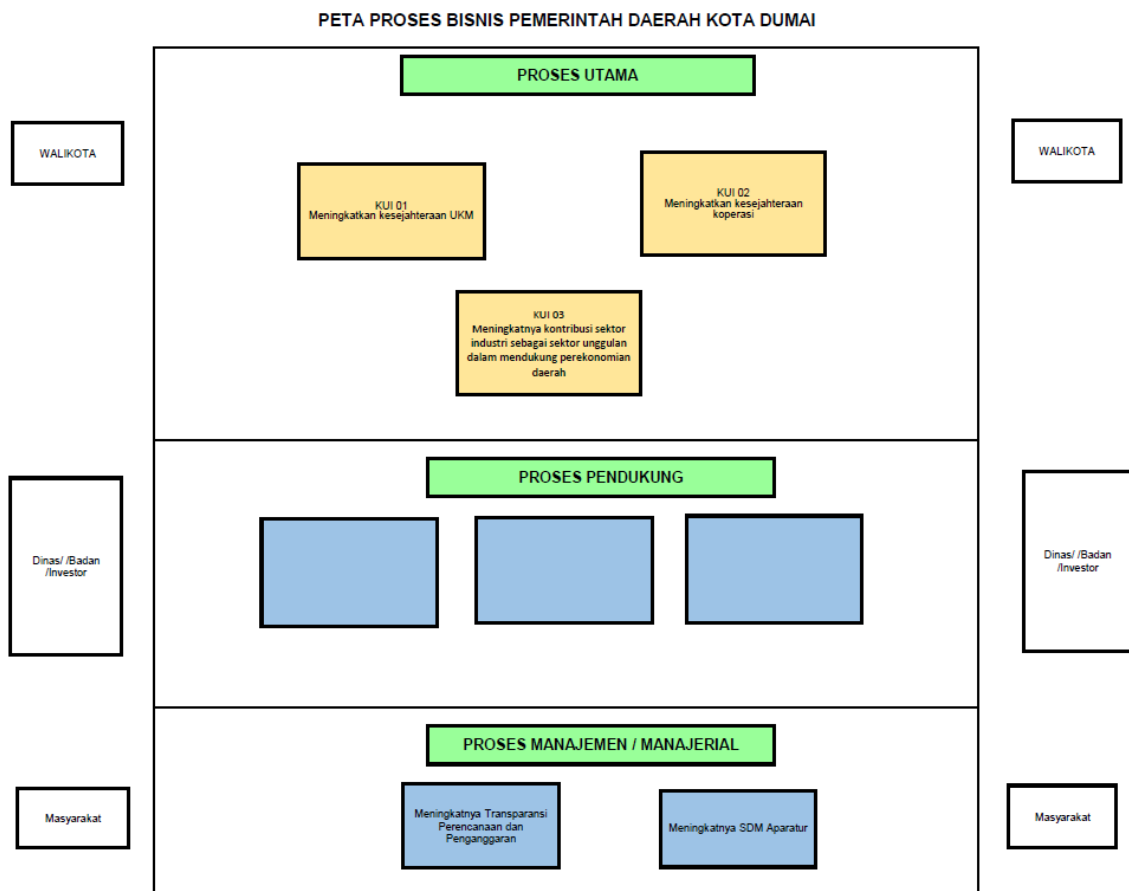


1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sebagaimana skema berikut:

Gambar 1.6.1

Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian



1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1303.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

NO	REKOMENDASI LHE 2023	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	AKSI/EVIDEN
1.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah dan Perindustrian Kota Dumai diharapkan menyusun Crosscutting Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian telah menyusun crosscutting sebagaimana terlampir pada laporan Sakip Organisasi Perangkat Daerah tahun 2023, namun oleh karena hasil evaluasi Inspektorat hal ini belum sempurna, maka akan kami tindaklanjuti sebagaimana mestinya.	1 Laporan	Desember 2023	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Telah selesai dilaksanakan	https://drive.google.com/file/d/1FkKmhFsQwNHnFhp6JQny/view?usp=drive_link

NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	AKSI/EVIDEN
2.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai diharapkan menuangkan realisasi rencana aksi dalam Monev Rencana Aksi tahun 2023 hingga per Triwulan II	Realisasi rencana aksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sudah dituangkan dalam monev rencana aksi tahun 2023 hingga per triwulan II s/d IV.	1 Laporan	Desember 2023	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Telah selesai dilaksanakan	https://drive.google.com/file/d/11qqiTlao2IMajW9EayWZicEjKohwC-LH/view?usp=drive_link
3.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai diharapkan membuat dan melampirkan tabel evaluasi renstra PD atau tabel pengendalian (dalev. Renstra) Perangkat Daerah 2021-2026; dan	Tabel Evaluasi Renstra Perangkat Daerah atau tabel pengendalian (dalev renstra) perangkat daerah 2021-2026 sudah dibuat dan dilampirkan dalam evaluasi implementasi SAKIP	1 Laporan	September 2023	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Telah selesai dilaksanakan	https://drive.google.com/file/d/1h7r0nD3-esHxS-J4HExzJBFSJ-WcVZOB/view?usp=drive_link

NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	AKSI/EVIDEN
4.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai diharapkan melampirkan hasil evaluasi kinerja pada e-kinerja (satu sampel individu) dan lembar pembayaran TPP kinerja pada e-kinerja (satu sampel individu) dan lembar pembayaran TPP individu (sampel satu bulan)	Hasil Evaluasi kinerja pada e-kinerja (satu sampel individu) dan lembar pembayaran TPP individu (sampel satu bulan) sudah dilampirkan dalam evaluasi implementasi SAKIP	2 Laporan	Desember 2023	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Telah selesai dilaksanakan	https://drive.google.com/file/d/1jwTDwB-uHM8ZsyqrUhi7yO5fHSGCII/VK/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1UTS7tzEUfrnLKnDTowMTFpuc54ID4nza/view?usp=drive_link

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

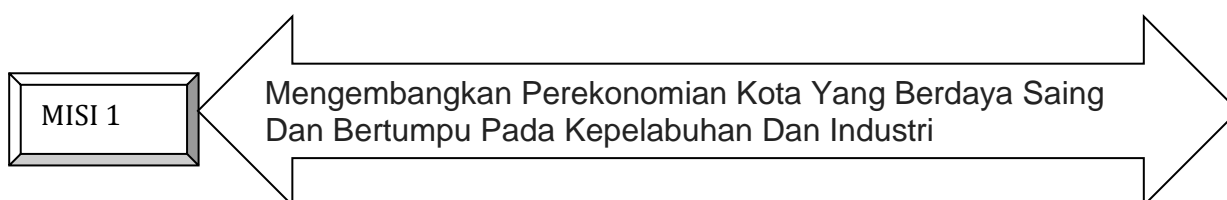
Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar 2.1.1



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi perubahan RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat

Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam dimanifestasikan dalam perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2021 – 2026 menyesuaikan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2.1

Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2021-2026

IKU WALI KOTA			IKU DINAS Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Renstra
Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah dengan indikator keberhasilan yaitu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ADHB dan ADHK) dan PDRB ADHB-ADHK perkapita	nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ADHB dan ADHK) dan PDRB ADHB-ADHK perkapita	Meningkatkan kontribusi sektor Industri pada PDRB Kota Dumai	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

IKU WALI KOTA			IKU DINAS Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Renstra
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka dan tingkat kemiskinan.	Indeks Gini	Terwujudnya pemerataan pendapatan koperasi dan UKM	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	Persentase Koperasi aktif
					Persentase Usaha Mikro dan Kecil

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian Tahun 2024

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI ke 1 : Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG MANDIRI DAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA	Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing daerah	Meningkatkan Perekonomian kota melalui optimalisasi peran seluruh stake holder	Meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan Mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan
		Peningkatan Produktivitas masyarakat	Memperkuat daya saing produk industri dan UMKM Meningkatkan kualitas pengelolaan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan daya saing produk-produk unggulan
		Peningkatan Daya saing daerah dan Iklim berusaha	Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Meningkatkan Peluang Kerja Bagi Masyarakat	Mewujudkan kelembagaan yang tanggap untuk kemajuan investasi Dumai Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang kondusif untuk meningkatkan daya saing pendukung ekonomi daerah
			Meningkatkan penyaluran tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industry yang memadai

			Memantapkan Implementasi kebijakan, strategi dan program – program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industry didaerah yang menyerap tenaga kerja lokal
--	--	--	---

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil
 Menengah dan Perindustrian Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	1. Persentase Koperasi aktif 2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil
2	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	1. Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 2. Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai di Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4.1
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	1. Persentase Koperasi aktif 2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil	71% 55%
2	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	1. Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 2. Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	65,9% 14%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar *Rp 7.397.167.500. (Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)* untuk melaksanakan 8 (Delapan) Program Kerja antara lain :

Tabel 2.4.2
Program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.978.411.350	APBD
2.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 150.000.000	APBD
3.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 241.810.000	APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 100.000.000	APBD
5.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 633.705.900	APBD
6.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 161.185.350	APBD
7.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 125.000.000	APBD
8.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 0	APBD
J U M L A H		Rp. 7.397.167.500	APBD

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.2

Program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.174.187.520	APBD
2.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 150.000.000	APBD
3.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 241.810.000	APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 100.000.000	APBD
5.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 802.937.200	APBD
6.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 161.185.350	APBD
7.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 130.000.000	APBD
8.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 50.000.000	APBD
J U M L A H		Rp. 7.810.120.070	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA DUMAI TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai

peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.a.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus : $capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

b. Rumus : $capaian = target - \frac{realisasi - target}{target} \times 100\%$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 3.a.2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

a. Indikator Persentase Koperasi Aktif

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Koperasi Aktif ada 3 (tiga) program yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

- ❖ Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan anggaran Rp. 150.000.000,00 dengan realisasi Rp. 114.836.600,00 atau 76,56% tingkat efisiensinya adalah 213,35% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (163,34%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (76,56%). Pencapaian tersebut menunjukkan capaian yang **meningkat**. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 11,13% realisasi sebesar 18,18% tercapai 163,34% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 tidak ada disebabkan pada tahun 2023 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi tidak dianggarkan.

Efisiensi Anggaran	213,35%
Nilai Anggaran	Rp. 150.000.000
Capaian 2024	163,34%
Target	11,13 %
Realisasi	18,18%

- ❖ Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan anggaran Rp. 241.810.000,00 dengan realisasi Rp. 222.216.800,00 atau 91,90% tingkat efisiensinya adalah 78,56% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (77,20%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (91,90%). Pencapaian tersebut menunjukkan capaian yang **meningkat**. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 23,55% realisasi sebesar 18,18% tercapai 77,20% atau bernilai kinerja **Tinggi**. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 tidak ada disebabkan pada tahun 2023 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian tidak dianggarkan.

Efisiensi Anggaran	78,56%
Nilai Anggaran	Rp. 241.810.000
Capaian 2024	77,20%
Target	23,55 %
Realisasi	18,18%

- ❖ Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi Rp. 90.441.512,00 atau 90,44% tingkat efisiensinya adalah 52,90% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (47,84%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (90,44%). Pencapaian tersebut menunjukkan capaian yang **menurun**. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 38% realisasi sebesar 18,18% tercapai 47,84% atau bernilai kinerja **Rendah**. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 138,11% atau tercapai sebesar 34,64%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 13,2%.

Efisiensi Anggaran	52,90%
Nilai Anggaran	Rp. 100.000.000
Capaian 2024	47,84%
Target	38 %
Realisasi	18,18%

b. Indikator Persentase Usaha Mikro Kecil

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Usaha Mikro Kecil ada 2 (dua) program yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

- ❖ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan anggaran Rp. 802.937.200 dengan realisasi Rp. 521.499.513 atau 64,95% tingkat efisiensinya (191,89%) adalah berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (64,95%). Pencapaian tersebut menunjukkan capaian yang **meningkat**. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 20% realisasi sebesar 124,63% tercapai 621,72% atau bernilai kinerja **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 91,13% atau tercapai sebesar 47,49%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 144,4%.

Efisiensi Anggaran	191,89%
Nilai Anggaran	Rp. 802.499.513
Capaian 2024	621,72%
Target	20%
Realisasi	124,63%

- ❖ Program Pengembangan UMKM dengan anggaran Rp. 161.185.350 dengan realisasi 122.172.300 atau 75,79% tingkat efisiensinya (420%) berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (75,79%). Pencapaian tersebut menunjukkan capaian yang **meningkat**. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 5% realisasi sebesar 124,63% tercapai 621,72% atau bernilai kinerja **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 91,13% atau tercapai sebesar 47,49%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 144,4%.

Efisiensi Anggaran	420%
Nilai Anggaran	Rp. 161.185.350
Capaian 2024	621,72%
Target	5%
Realisasi	124,63%

c. Indikator Pesentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Capaian kinerja untuk indikator Pesentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB ada 1 (satu) program yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

- ❖ Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan anggaran Rp. 130.000.00,00 dengan realisasi Rp. 101.130.355,00 atau 77,79% tingkat efisiensinya (118,41%) berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (77,97%). Pencapaian tersebut menunjukkan capaian yang **Meningkat**. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 77,79% tercapai 77,79% atau bernilai kinerja **Sedang**. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 61,25% atau tercapai sebesar 95,85%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 3,74%.

Efisiensi Anggaran	77,79%
Nilai Anggaran	Rp. 130.000.000
Capaian 2024	11,71%
Target	100%
Realisasi	77,79%

d. Indikator Pesentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Capaian kinerja untuk indikator Pesentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin ada 1 (satu) program yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

- ❖ Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan anggaran Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi 28.420.000,00 atau 56,84% tingkat efisiensinya (135,33%) berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (56,84%). Pencapaian tersebut menunjukkan capaian yang **meningkat**. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 65% realisasi sebesar 50% tercapai 76,92% atau bernilai kinerja **Tinggi**. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 tidak ada disebabkan pada tahun 2023 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional tidak dianggarkan.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian			
			dst	2022	2023	2024	dst	2022	2023	2024	dst	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	Persentase Koperasi Aktif		68,53%	70,58%	71%		62,5%	65,16%	67,27%		91,20%	92,32%	95,38%
		Persentase Usaha Mikro Kecil		35%	45%	55%		25,79%	22,13%	25%		73,68%	49,17%	45,45%
2. 4.	Meningkatnya Kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah Dst	Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB		61,9%	63,9%	65,9%		61,79%	61,25%	60,90%		99,82%	95,85%	92,41%
		Persentase Cakupan Kelompok Bina pengrajin		9%	13%	14%		0%	4,33%	10,78%		0%	33,08%	77,03%

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

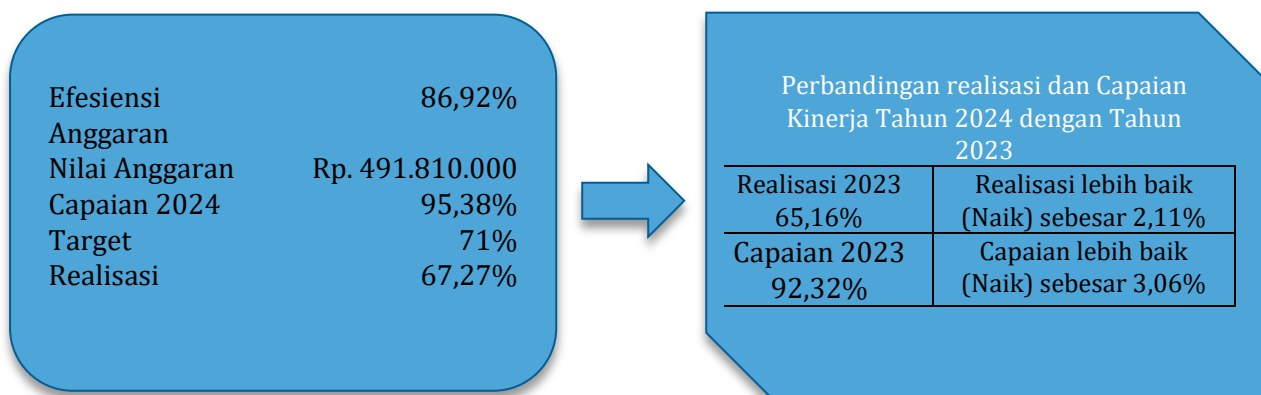
1. Indikator Kinerja Utama yang harus ditampung oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian selama 5 tahun kedepan yaitu :

- ❖ Indikator pertama adalah persentase koperasi aktif pada tahun 2022 adalah 68,53% berasal dari perhitungan Jumlah Koperasi aktif dibagi dengan jumlah seluruh koperasi dikali 100. Pada tahun 2022 jumlah koperasi di Kota Dumai berjumlah 288 Koperasi berdasarkan rekapitulasi data keragaan Koperasi Kota Dumai dan jumlah koperasi aktif pada tahun 2022 sebesar 180 koperasi, bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 17 Koperasi, kenaikan ini disebabkan karena pengurus koperasi sudah melaksanakan RAT dengan tepat waktu. Realisasi pada tahun 2022 adalah 62,5% dengan capaian 91,20%
- ❖ Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 70,58% dan realisasinya adalah 65,16% dengan rincian Jumlah koperasi di Kota Dumai berjumlah 310 Koperasi dengan Jumlah Koperasi Aktif berjumlah 202 Koperasi, Koperasi Tidak Aktif berjumlah 108 koperasi sehingga capaian kinerja 92,32%.
- ❖ Pada tahun 2024 target kinerja naik menjadi 71% dan realisasinya adalah 67,27% dengan rincian Jumlah koperasi di Kota Dumai berjumlah 330 Koperasi dengan Jumlah Koperasi Aktif berjumlah 222 Koperasi, Koperasi Tidak Aktif berjumlah 108 koperasi sehingga capaian kinerja 95,38%.

Apabila tidak tercapainya realisasi 100% agar diuraikan permasalahannya, yaitu :

- Tingginya Jumlah Koperasi Tidak Aktif disebabkan oleh :
 - Banyak koperasi tidak aktif disebabkan oleh kurangnya pembinaan atau pengawasan
 - Koperasi tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan pasar atau teknologi
 - Kelemahan dalam manajemen internal koperasi, seperti tata kelola yang kurang baik, laporan keuangan yang tidak tersusun, atau konflik internal
- Keterbatasan Kapasitas dan Sumber Daya Koperasi Aktif disebabkan oleh :
 - Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola koperasi secara profesional.

- Kurangnya pemahaman pengurus tentang kewajiban seperti pelaporan keuangan dan perpajakan.
 - Terbatasnya akses terhadap teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan daya saing.
- Kurangnya Pemanfaatan Program Pendukung Pemerintah
- Tidak semua koperasi mampu memanfaatkan fasilitas pendampingan, pelatihan, atau bantuan pemerintah secara maksimal.
 - Sosialisasi program pendukung mungkin belum merata atau tidak efektif menjangkau seluruh koperasi.



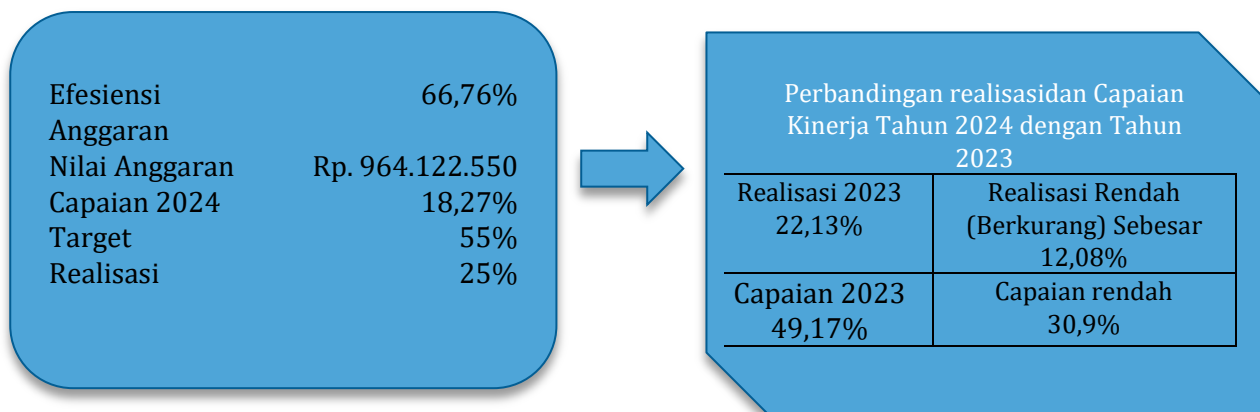
2 Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah persentase usaha mikro kecil

- ❖ Pada tahun 2022 Jumlah keseluruhan UMKM di Kota Dumai berjumlah 8.779 UMKM, dan jumlah UMKM yang dibina perkecamatan pada tahun 2022 sebesar 2.264 UMKM, bila dibandingkan dengan tahun 2021 Jumlah UMKM berjumlah 6.515 UMKM mengalami kenaikan sebesar 2.264 UMKM, kenaikan ini di sebabkan oleh banyaknya minat masyarakat untuk berwirausaha baru. Realisasi pada tahun 2022 adalah 62,5% dengan capaian 91,20%.
- ❖ Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 45% dan realisasinya adalah 22,13% dengan rincian Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Dumai berjumlah 11.274, dan jumlah UMKM yang dibina perkecamatan pada tahun 2023 sebesar 2.495 UMKM dengan capaian kinerja 49,17%.

- ❖ Pada tahun 2024 target kinerja naik menjadi 55% dan realisasinya adalah 25% dengan rincian Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Dumai berjumlah 10.080, dan jumlah UMKM yang dibina perkecamatan pada tahun 2024 sebesar 1.160 UMKM dengan capaian kinerja 45,45%.

Apabila tidak tercapainya realisasi 100% agar diuraikan permasalahannya, yaitu :

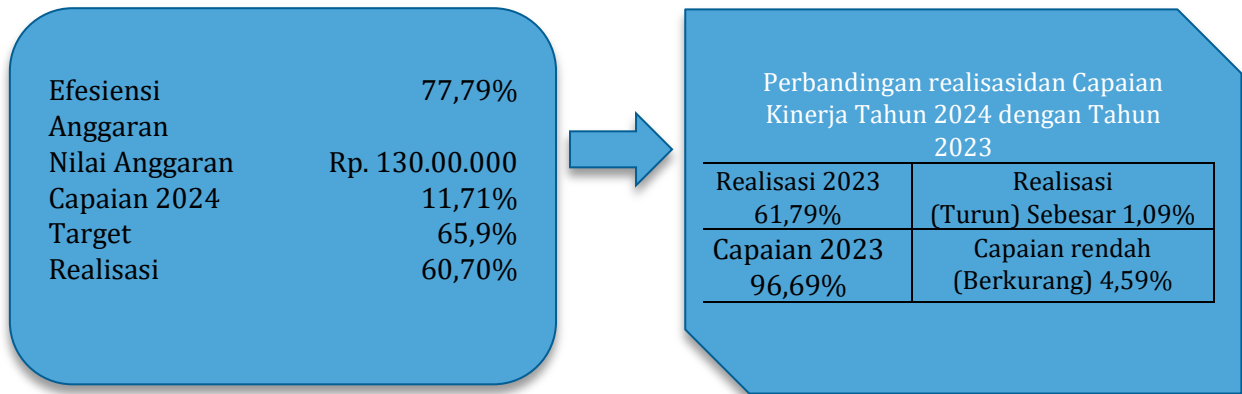
- Karena target renstra program yang mendukung indikator persentase usaha mikro kecil sebesar 55 % sedangkan alokasi penganggaran program untuk mendukung indikator tersebut sebesar 25%.



3. Indikator Kinerja Yang ke ketiga adalah Pesentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

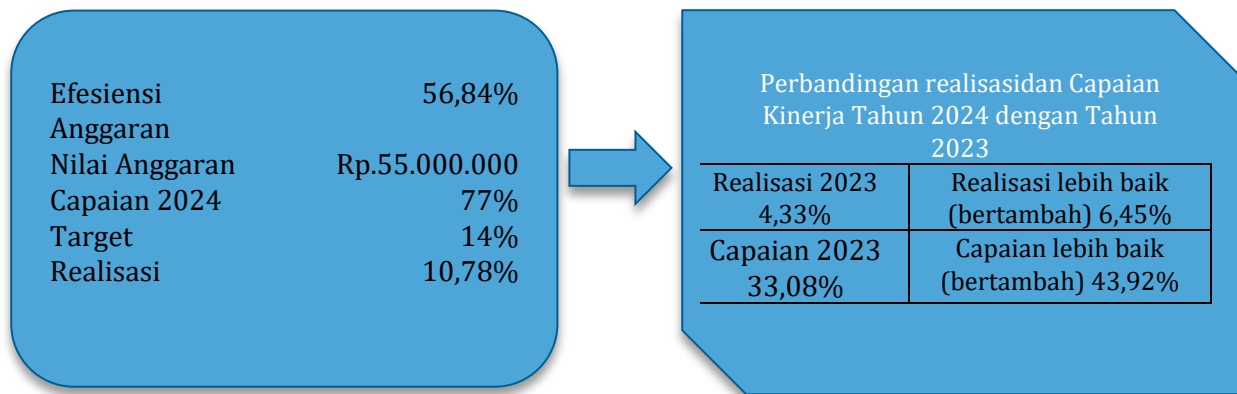
- ❖ Pada tahun 2022 Jumlah sektor pengolahan sebesar 61,80% pada PDRB ADHB dengan pertumbuhan sebesar 61,79% pertahun sedangkan PDRB sehingga kondisi ini menggambarkan terjadinya percepatan pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya yang disebabkan oleh peningkatan produksi barang dan jasa serta harya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi sektor lainnya.
- ❖ Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 63,9% dan realisasinya adalah 61,25% dengan rincian Laju Pertumbuhan PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) di lihat dari lapangan usaha khususnya industri pengolahan pada tahun 2023 berjumlah 61,79%, dengan capaian kinerja 96,69%.

- ❖ Pada tahun 2024 target kinerja naik menjadi 65,9% dan realisasinya adalah 60,70% dengan rincian Laju Pertumbuhan PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) di lihat dari lapangan
- ❖ usaha khususnya industri pengolahan pada tahun 2024 berjumlah 60,70%, dengan capaian kinerja 92,10%



3 Indikator Kinerja Yang ke empat adalah Persentase Cakupan Kelompok Bina Pengrajin

- ❖ Pada tahun 2022 Jumlah ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang menjanjikan untuk mendapatkan perhatian oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengembangan ekonomi kreatif adalah decade terakhir menjadi alternative solusi sekaligus strategi global dan pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya, ini disebabkan karena sudah banyaknya pelaku usaha meningkatkan kreatifitas disetiap kelurahan Realisasi pada tahun 2022 adalah 0% dengan capaian 0%.
- ❖ Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 13% dan realisasinya adalah 4,33% dengan rincian Jumlah pelaku usaha yang dilatih handcraft (lidi sawit) pada tahun 2023 sebesar 10 orang/pelaku usaha dengan realisasi 4,33% capaian kinerja 33,08%.
- ❖ Pada tahun 2024 target kinerja naik menjadi 14% dan realisasinya adalah 10,78% dengan rincian jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dan pengenakalan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) IKM jumlah peserta 40 Orang dan pelatihan Home Industri Kuliner Tradisional Melayu Riau Dumai dengan peserta 15 dengan realisasi 10,78% capaian kinerja 77,03%.

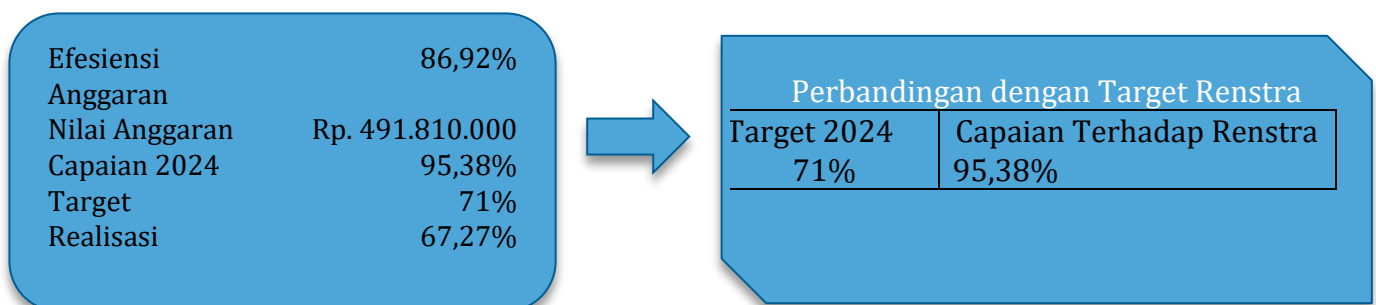


3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yaitu:

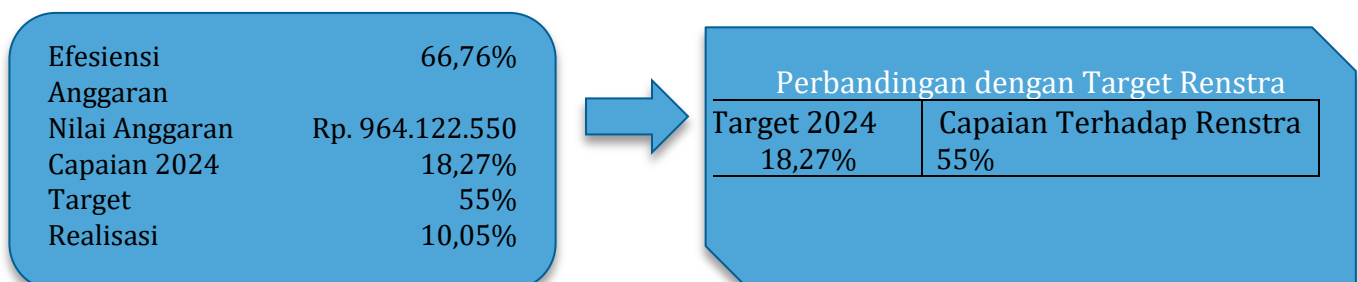
✚ Indikator persentase koperasi aktif

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator persentase koperasi aktif tahun 2024 **melebihi** dari target akhir Renstra yaitu sebesar 95,38% dari target Renstra sebesar 71% dan terealisasi 95,38% pada tahun 2024



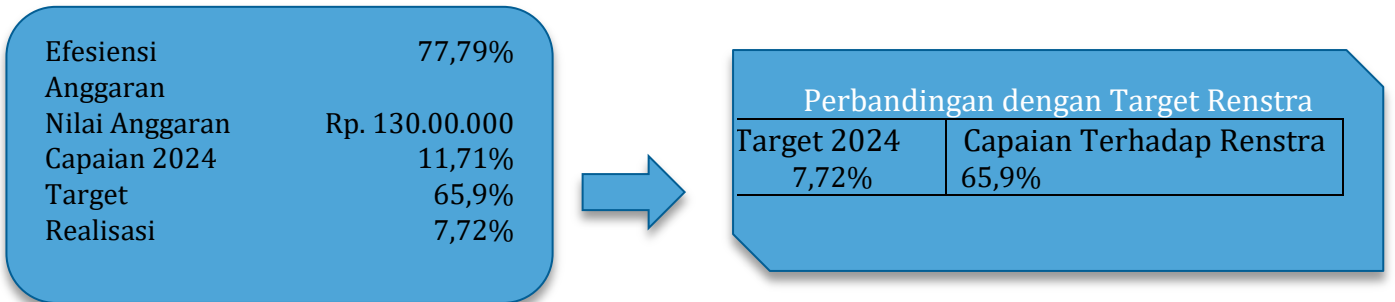
✚ Indikator persentase usaha mikro kecil

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator persentase usaha mikro kecil tahun 2024 **kurang** dari target akhir Renstra yaitu sebesar 18,27% dari target Renstra sebesar 55% dan terealisasi 18,27% pada tahun 2024



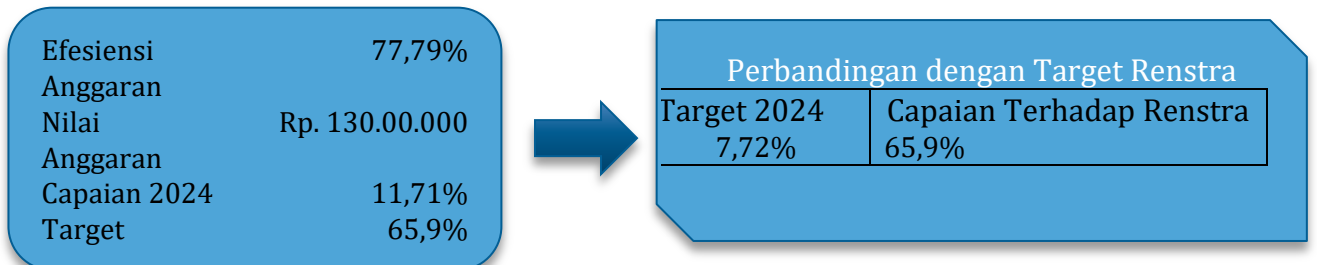
✚ Indikator persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2024 **kurang** dari target akhir Renstra yaitu sebesar 7,72% dari target Renstra sebesar 65,9% dan terealisasi 7,72% pada tahun 2024



✚ Indikator Pesentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Pesentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin tahun 2024 **Sedang** dari target akhir Renstra yaitu sebesar 10,78% dari target Renstra sebesar 14% dan terealisasi 10,78% pada tahun 2024



3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan standar Nasional sebagaimana tabel 3.4.1 berikut :

Tabel 3.4.1
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	STANDAR NASIONAL	KETERANGAN
1.	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	Persentase Koperasi Aktif	67,27%		Secara langsung, belum ada standar yang mengatur perbandingan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dengan Standar Nasional
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	10,05%		
2.	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	7,72%		
		Persentase Cakupan Kelompok Pengrajin	10,78%		

3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi

1. Indikator persentase koperasi aktif
 - a. Capaian kinerja untuk indikator persentase koperasi aktif menunjukkan capaian yang **meningkat**. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 71% realisasi sebesar 67,27% tercapai 95,38%.atau bernilai kinerja **Tinggi** (tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 65,16% atau tercapai sebesar 92,32%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 3,06%
 - b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** persentase koperasi aktif **sesuai** target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan KSP/USP koperasi yang dilakukan oleh pengurus dan pengelola, apakah pengelolaan koperasi telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja koperasi kedepannya.
 - untuk memberikan motivasi pada koperasi agar dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat serta mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu sebagai gambaran keberhasilan upaya pengembangan koperasi.
 - untuk meningkatkan pengetahuan pengurus/pengelola koperasi tentang perkoperasian dan meningkatkan kualitas dan profesionalitas pengelolaan usaha Koperasi serta membentuk kader-kader koperasi yang tangguh, partisipatif dan berwawasan luas.
 - untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan serta motivasi keluarga/masyarakat agar dapat menjadi lapangan pekerjaan/berwirausaha pembuatan batik untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

- **Faktor penghambat Capaian Indikator** persentase koperasi aktif adalah sebagai berikut:
 - Dari sisi koperasi kurangnya kelengkapan dokumen, kurang akurat data yang diberikan oleh koperasi yang akan dinilai dan dari sisi petugas masih kurang SDM yang terampil dalam melakukan penilaian sehingga memerlukan waktu yang lebih banyak untuk mendapatkan hasil.
 - kurangnya kelengkapan dokumen, kurang akurat data yang diberikan oleh koperasi yang akan dinilai, serta ada koperasi yang belum bisa diikutsertakan karena keterbatasan anggaran.
 - masih ada peserta pelatihan tidak serius mengikuti pelatihan sampai selesai sehingga Pengurus/Pengelola Koperasi Kurang Memahami Materi yang disajikan.
 - keterbatasan bahan baku dan waktu dalam pelaksanaan pelatihan membuat serta keseriusan peserta dalam mengikuti pelatihan sehingga batik yang dihasilkan kurang maksimal.
- c. **Tindak lanjut Capaian Indikator** persentase koperasi aktif adalah sebagai berikut:
 - perlu dilakukan pendampingan terhadap koperasi dan pembinaan lebih lanjut terhadap koperasi yang akan dinilai dan perlu adanya penganggaran yang lebih agar dapat mengikutsertakan aparatur/petugas dalam pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan SDM petugas penilaian kesehatan koperasi.
 - perlu dilakukan pendampingan terhadap koperasi dan pembinaan lebih lanjut terhadap koperasi yang akan dinilai serta perlu adanya penganggaran yang lebih agar dapat mengikutsertakan lebih banyak koperasi yang akan diberikan penilaian.
 - perlu dilakukan bimbingan dan pembinaan lebih lanjut terhadap peserta pelatihan serta perlu adanya penganggaran yang lebih untuk pelatihan lanjutan terhadap Pengurus/Pengelola, Pengawas dan Anggota koperasi di Kota Dumai.

- perlu dilakukan bimbingan dan pembinaan lebih lanjut terhadap peserta pelatihan serta perlu adanya penganggaran yang lebih untuk pelatihan lanjutan terhadap keluarga dan pelaku usaha lainnya yang ada di Kota Dumai.

2. Indikator Persentase Usaha Mikro dan Kecil

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Usaha Mikro dan Kecil menunjukkan capaian yang **Menurun**. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 55% realisasi sebesar 10,05% tercapai 18,27% atau bernilai kinerja sangat rendah (sangat rendah). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 22,13% atau tercapai sebesar 49,17%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 30,9%

b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase Usaha Mikro dan Kecil **kurang** target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kemampuan umkm sehingga dapat bersaing dalam perdagangan bebas yang dihadapi
- Terciptanya pola pembinaan umkm yang terintegrasi.
- Menumbuh dan meningkatkan kemampuan usaha mikro menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri sehingga dapat berkembang menjadi usaha kecil maupun menengah.
- Upaya meningkatkan peran umkm dalam Pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan.

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Usaha Mikro dan Kecil adalah sebagai berikut:

- Kurangnya kemampuan manajemen.
- Keterbatasan pengetahuan teknis.
- Kurangnya akses keuangan.
- Ketergantungan pada pasar lokal.
- Kurangnya inovasi dan kreativitas.

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Usaha Mikro dan Kecil adalah sebagai berikut:

- Pendataan UMKM sangat penting untuk memahami kondisi dan kebutuhan mereka.
- Pembinaan UMKM harus berfokus pada peningkatan kapasitas dan kemampuan.
- Keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting untuk kesuksesan program.
- Teknologi digital dapat mempercepat proses pendataan dan pembinaan.
- Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan program.
- Pembinaan UMKM harus berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan mereka.
- Evaluasi dan pemantauan berkala sangat penting untuk mengukur kesuksesan program.

3. Indikator Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB

a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 65,9% realisasi sebesar 7,72% tercapai 11,71% atau bernilai kinerja ≤ 50 (sangat rendah). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 7,72% atau tercapai sebesar 12,08%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 0,37%.

b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB **kurang** target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Penyebab keberhasilan nilai produk domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan adalah tingginya tingkat pertumbuhan dan perkembangan usaha baru

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB adalah sebagai berikut:

- Penyebab kegagalan dari capaian indikator Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB disektor industri pengolahan adalah tidak adanya atau kurangnya perkembangan dan pertumbuhan usaha baru.

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Usaha Mikro dan Kecil adalah sebagai berikut:

- Memudahkan akses dalam berusaha
- Memudahkan akses dalam permodalan
- Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat dalam menumbuh kembangkan usaha agar tingkat pertumbuhan dan perkembangan usaha baru meningkat.

4. Indikator Persentase Cakupan Kelompok Bina Pengrajin

a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Cakupan Kelompok Bina Pengrajin menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 14% realisasi sebesar 7,72% tercapai 11,71% atau bernilai kinerja ≤ 50 (sangat rendah). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 7,72% atau tercapai sebesar 12,08%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 0,37%.

b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase Cakupan Kelompok Bina Pengrajin **kurang** target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- untuk peningkatan penggunaan produksi dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Untuk memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan Sumber Daya Manusia dari dalam negeri.
- memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penggunaan produk dalam negeri serta peningkatan tingkat komponen dalam negeri dalam setiap pembelian barang atau jasa oleh OPD.

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Cakupan Kelompok Bina Pengrajin adalah sebagai berikut:

- Masih minimnya jumlah IKM yang memiliki akun SIINas yang diakibatkan oleh ketidak tahuan serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pemanfaatan SIINas sebagai Pusat data dan Informasi Industri dalam skala Nasional.

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Cakupan Kelompok Bina Pengrajin adalah sebagai berikut:

- Diharapkan kedepan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian dapat terus melakukan Sosialisasi sekaligus Diseminasi terkait Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) terutama dalam memberikan informasi kepada IKM untuk dapat melengkapi legalitas usahanya dengan sertifikat TKDN-IK.

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	IKU	sasaran Program	indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	capaian anggaran (%)
1.	Persentase kopearsi aktif	Terlaksananya penilaian KSP/USP	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	11,13%	163,34	%	150.000.000	114.836.600	76,55%
		Terlaksananya Pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	23,55%	77,20	%	241.810.000	222.216.800	91,90%
		Terlaksananya Koperasi yang diberi Fasilitas Pendampingan Kelembagaan	Persentase yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	38%	47,84%	%	100.000.000	90.441.512	90,44%

2.	Persentase Usaha mikro dan kecil Persentase kopearsi aktif	Terlaksananya Pendataan Usaha Mikro	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	20%	621,72	%	802.937.200	521.499.513	64,95%
		Terlaksananya Pembinaan Usaha Mikro	Persentase Jumlah UMKM yang dibina	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	5%	621,72	%	161.185.350	122.172.300	75,80%
	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Terlaksananya Dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	100%	77,79	%	130.000.000	101.130.355	71,97%
	Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Terdatanya perusahaan dalam sistem SIINAS	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	65%	76,92	%	50.000.000	28420000	56,84%

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7.1
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	Persentase Koperasi aktif	95,38%	86,92%
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	18,27%	66,76%
2	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	11,71%	77,79%
		Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	77,03%	56,84%

Berdasarkan table diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut::

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama Pertama* yaitu Persentase Koperasi aktif tingkat efisiensinya adalah 109,73% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (95,38%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (86,92%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama Kedua* yaitu Persentase Usaha Mikro dan Kecil tingkat efisiensinya adalah 28,02% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (11,71%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (66,76%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG**; Karena target 2024 lebih kecil dibandingkan dari target 2023.

- c. Pada *Indikator Kinerja Utama Ketiga* yaitu Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB tingkat efisiensinya adalah 15,05% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (11,71%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (77,79%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG**; dikarenakan Tidak adanya atau kurangnya perkembangan dan pertumbuhan usaha baru.
- d. Pada *Indikator Kinerja Utama Keempat* yaitu Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin tingkat efisiensinya adalah 135,52% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (77,03%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (56,84%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT**;

3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8.1
Prestasi dan Penghargaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Tahun 2024

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Tokoh Gerakan Koperasi	Jasa dan Darmabakti dalam memajukan Perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah	Nasional	Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia
2	Koperasi berprestasi tingkat Provinsi Tahun 2023	Peringkat I Jenis Jasa	Provinsi Riau	Gubernur Riau
3	Koperasi berprestasi tingkat Kota Dumai	Peringkat I s/d harapan IV Jenis jasa	Kota Dumai	Walikota Dumai

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun Anggaran per Sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.8.2

Ringkasan Anggaran dan realisasi Tahun 2024

Uraian Program/ Kegiatan/ SubKegiatan		Alokasi Anggaran(Rp)	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.473.193,00	17.446.600,00
	1 Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.473.193,00	17.446.600,00
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.213.388.745,00	4.060.715.826,00
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.161.817.400,00	4.024.232.226,00
	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.695.295,00	-
	3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	47.876.050,00	36.483.600,00
	3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.138.880,00	23.082.800,00
	1 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.138.880,00	23.082.800,00
	4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.751.3042,00	469.252.420
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.781.300,00	6.760.600,00
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.629.838,00	68.623.400,00
	3 Sub Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.250.074,00	15.834.950,00
	4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.974.400,00	15.980.000,00
	5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.005.730,00	17.994.800,00
	6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.940.000,00	5.310.000,00
	7 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan tamu	7.025.000,00	3.555.000,00
	8 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	411.906.700,00	335.193.670,00

Uraian Program/ Kegiatan/ SubKegiatan		Alokasi Anggaran(Rp)	Realisasi
5	Kegiatan pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	91.592.450,00	91.450.000,00
	1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	30.796.200,00	30.750.000,00
	2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	60.796.250,00	60.700.000,00
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	986.645.160,00	904.018.471,00
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.370.000,00	2.200.000,00
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.913.240,00	125.336.551,00
	3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	849.361.920,00	776.481.920,00
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	986.645.160,00	213.036.407,00
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.000.000,00	14.650.000,00
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.756.050,00	95.949.207,00
	3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.840.000,00	15.640.000,00
	4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	88.840.000,00	86.797.200,00
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	150.000.000,00	114.836.600,00
1	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/USP Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam 1 daerah	150.000.000,00	114.836.600,00
	1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kab/Kota	75.000.000,00	45.949.000,00
	2 Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja, Keuangan dan Permodalan	75.000.000,00	68.887.600,00
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	241.810.000,00	222.216.800,00
1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	241.810.000,00	222.216.800,00
	1 Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	241.810.000,00	222.216.800,00
4	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	100.000.000,00	90.441.512,00
1	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kab/Kota	100.000.000,00	90.441.512,00
	1 Sub Kegiatan Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	100.000.000,00	90.441.512,00

Uraian Program/ Kegiatan/ SubKegiatan		Alokasi Anggaran(Rp)	Realisasi
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	802.937.200,00	521.499.513,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan	802.937.200,00	521.499.513,00
	1 Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	50.000.000,00	2.985.000,00
	2 Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	92.176.400,00	88.927.000,00
	3 Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan standarisasi Usaha Mikro	75.000.000,00	71.800.000,00
	4 Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	366.000.000,00	163.740.353,00
	5 Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	219.760.800,00	194.047.160,00
6	Program Pengembangan UMKM	161.185.350,00	122.172.300,00
1	Kegiatan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	161.185.350,00	122.172.300,00
	1 Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	161.185.350,00	122.172.300,00
7	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	130.000.000,00	101.130.355,00
1	Kegiatan penyusunan dan Evaluasi rencana Pembangunan Industri kab/Kota	130.000.000,00	101.130.355,00
	1 Sub Kegiatan Koodinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	80.000.000,00	61.930.455,00
	2 Sub Kegiatan Koodinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	50.000.000,00	39.199.900,00
8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	50.000.000,00	28.420.000,00
1	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	28.420.000,00
	1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kab/Kota melalui SINas	50.000.000,00	28.420.000,00
TOTAL		7.810.120.070,00	6.979.719.604,00

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Akuntabilitas kinerja Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai didasarkan pada kinerja pelaksanaan kegiatan yang mendukung program dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama satu tahun anggaran. Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran program, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja kegiatan dan program dari sektor lain. Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran secara umum disebabkan :

- Mekanisme perencanaan yang detail dan selektif
- Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan
- Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan target yang direncanakan
- Melakukan koordinasi antar/lintas Perangkat Daerah secara optimal

B. PERMASALAHAN

Meskipun secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian telah melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik, namun demikian bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak ada permasalahan, hambatan maupun kekurangan baik yang bersifat khusus dan teknis. Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Kurangnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang – bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, agar program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terarah.
- Kurangnya Perkembangan perkoperasian di Kota Dumai disebabkan adanya belum paham tentang manfaat dan tujuan dari koperasi, dan kesadaran pengurus serta pengawas atas tugas dan tanggungjawabnya sehingga pengelolaan koperasi menjadi tidak professional, Hal ini terlihat dari naik dan turunnya jumlah koperasi dari tahun ke tahun;
- Kurangnya kesadaran anggota akan hak dan kewajibannya pada koperasi;
- Kurangnya tenaga teknis pembina koperasi;
- Masih rendahnya SDM dalam pengelolaan usaha yang modern dan berdaya saing;

- Terbatasnya akses pasar yang menyebabkan kurangnya kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam memproduksi barang dan jasa;
- Kurangnya promosi hasil produksi UMKM;
- Belum berfungsinya kader pemberdayaan masyarakat karena belum adanya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan;
- Kurangnya jumlah staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelaksana teknis; Masih kurangnya sarana dan prasarana yang cukup khususnya sarana mobilitas dan peralatan komputer.

C. LANGKAH STRATEGIS

Meningkatkan kualitas berkesinambungan dengan konsolidasi pejabat terkait secara konsisten dengan lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Kementerian Perindustrian. Langkah strategis yang dapat dilakukan adalah :

- Memperluas akses pasar produk dan jasa seperti digitalisasi UMKM. Pada era saat ini digitalisasi sangatlah penting artinya. Karena banyak dari masyarakat pengguna media sosial sehingga UMKM dapat mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Penguatan sistem logistic nasional untuk memudahkan arus barang UMKM, membangun sentra-sentra UMKM.
- Akselerasi pembiayaan dan Investasi Dapat dilakukan dengan kemitraan dengan usaha besar sebagai offtaker maupun avails, pelibatan fintech dalam pembiayaan UMKM, mengoptimalkan pembiayaan KSP, KUR khusus dan inventasi, CSR BUMN dan pembiayaan non bank.
- Mempermudah dan memberikan kesempatan berusaha kepada UMKM dapat berupa kebijakan afirmasi untuk perpajakan, pengupahan, penempatan produk UMKM di mall dan e-commerce dan produk UMKM masuk ke dalam e-catalogue
- Meningkatkan daya saing produk dan jasa UMKM yang ada
- Pengembangan kapasitas manajemen SDM
- Peningkatan kuantitas, kualitas dan konsistensi Produk Industri menuju industri yang berstandarisasi
- Strategi pemasaran produk IKM melalui pasar tradisional, pasar modern dan pasar online
- Peningkatan Koperasi aktif dan sehat
- Peningkatan Kualitas UMKM

Disarankan, untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan evaluasi serta pengendalian secara rutin, serta pengawasan yang berkesinambungan, sehingga apabila muncul kendala segera dapat dicari solusi pemecahannya

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Dumai, Januari 2025
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN PERINDUSTRIAN



SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740925 199502 1 001

LAMPIRAN

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2021 - 2026**

VISI : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu

MISI : Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri

SASARAN : 1. Meningkatnya Perekonomian dan Daya saing daerah
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai

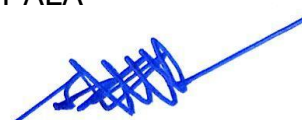
TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KET		
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET						URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET						STRATEGI		KEBIJAKAN	PROGRAM
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020				2021	2022	2023	2024	2025	2026						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Meningkatkan kontribusi sektor Industri pada PDRB Kota Dumai	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri dibagi jumlah PDRB di kali 100		59,9	61,9	63,9	65,9	66,2	67	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri dibagi jumlah PDRB di kali 100		59,9	61,9	63,9	65,9	66,2	67	Peningkatan Perekonomian kota Melalui Optimalisasi peran seluruh stake holder	Meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan Mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI ➢ PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL ➢ PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 			
Terwujudnya pemerataan pendapatan koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	Jumlah Koperasi Aktif di bagi Jumlah seluruh koperasi di kali 100		68,53	68,53	70,58	71	72	73	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	Persentase Koperasi aktif	Jumlah Koperasi Aktif di bagi Jumlah seluruh koperasi di kali 100		68,53	68,53	70,58	71	72	73	Peningkatan Produktivitas masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Memperkuat daya saing produk industri dan UMKM ➢ Meningkatkan kualitas pengelolaan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan daya saing produk-produk unggulan ➢ Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI ➢ PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI ➢ PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN ➢ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 			

**RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2024**

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
				2024
(1)	(2)		(4)	(5)
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Anggota Koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	%	71
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	55
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri sebagai sektor Unggulan dalam Mendukung Perekonomian Daerah	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	65,9
		Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	14

Dumai, September 2024
Pihak Pertama
KEPALA



SEPRANEF SYAMSIR, AP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740925 199502 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS
Jabatan : WALI KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung Jawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



H. PAISAL, SKM, MARS



SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si
NIP. 19740925 199502 1 001

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK PERTAMA

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Anggota Koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	71
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	55
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri sebagai sektor Unggulan dalam Mendukung Perekonomian Daerah	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	65,9
		Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	14

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 150.000.000	
2	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian	Rp. 241.810.000	
3	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp. 100.000.000	
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 640.760.800	
5	Program Pengembangan UMKM	Rp. 161.185.350	
6	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp. 125.000.000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.978.411.350	Pendukung



H. PAISAL, SKM, MARS



Dumai, 1 Februari 2024

SEPRANEF SYAMSIR, AP.M.Si

NIP. 19740925 199502 1 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS
Jabatan : WALI KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024



Lampiran Perjanjian Kinerja

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
				2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Anggota Koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	%	71
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	55
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri sebagai sektor Unggulan dalam Mendukung Perekonomian Daerah	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	65,9
		Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	14

Sasaran 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Anggota Koperasi dan UKM

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 6.174.187.520
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		150.000.000
	Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 150.000.000
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 75.000.000
	Penilaian kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Rp. 75.000.000
Program Pendidikan dan latihan perkoperasian		241.810.000
	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/Kota	Rp. 241.810.000
	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Rp. 241.810.000
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi		100.000.000
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 100.000.000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Rp. 100.000.000
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		Rp. 802.937.200
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para Pemangku kepentingan	Rp. 802.937.200
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rp. 50.000.000

	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp.	92.176.400
	Fasilitasi Sertifikasi dan standarisasi usaha Mikro	Rp.	75.000.000
	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Rp.	366.000.000
	Penyusunan Basis Data usaha Mikro	Rp.	219.760.800
Program Pengembangan UMKM		Rp.	161.185.350
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp.	161.185.350
5.1	Produksi dan Pengolahan Pemasaran, sumber daya Manusia, serta Desain dan teknologi	Rp.	161.185.350

Sasaran 2 : Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri sebagai sektor Unggulan dalam Mendukung Perekonomian Daerah

Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri			130.000.000
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp.	130.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp.	80.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp.	50.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			50.000.000
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPK Kewenangan Kabupaten/Kota		50.000.000
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Nasional (SIINas)		50.000.000
Jumlah		Rp.	7.810.120.070





**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULFIKAR,S.Sos., M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK PERTAMA,

ZULFIKAR, S.Sos., M.Si
NIP. 19810207 200701 1 003



PIHAK KEDUA,

SEPRANEF SYAMSIR, AP.M.Si
NIP. 19740925 199502 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Tahun Anggaran : APBD-P TAHUN 2024

No.	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan koperasi dan UKM	1 Tersusunnya Dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.473.193
		2 Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	2 Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah	3 Laporan	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.213.388.745
		3 Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Jumlah dokumen/laporan administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	2 Laporan	3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	27.138.880
		4 Tersedianya dokumen/laporan administrasi umum perangkat daerah	4 Jumlah dokumen/laporan administrasi umum perangkat daerah	4 Dokumen	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	567.513.042
		5 Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	5 Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	13 Unit	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.592.450
		6 Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	6 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 laporan	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	986.645.160
		7 Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 unit	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.436.050
JUMLAH ANGGARAN						6.174.187.520



DUMAI, September 2024
SEKRETARIS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI

ZULFIKAR, S.Sos., M.Si
NIP. 19810207 200701 1 003



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAN YETTY HAMILYA, S.Kom

Jabatan : KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK PERTAMA



SEPRANEF SYAMSIR, AP.M.Si
NIP. 19740925 199502 1 001


WAN YETTY HAMILYA, S.Kom
NIP. 19760903 200212 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Tahun Anggaran : APBD-P TAHUN 2024

No.	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan koperasi dan UKM	1 Terselenggaranya Penilaian dan penghargaan kesehatan KSP/USP Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	21 Unit usaha	1 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	150.000.000
		2 Tersedianya Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	2 Jumlah SDM yang Memahami pengetahuan perkoperasian	60 Orang	2 Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Kabupaten/Kota	241.810.000
		3 Terlaksananya Koperasi yang diberi Fasilitas Pendampingan Kelembagaan untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2 Jumlah Koperasi yang diberi fasilitas pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	22 Orang	3 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam kabupaten/kota	100.000.000
JUMLAH ANGGARAN						491.810.000



DUMAI, September 2024
KABID KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI


WAN YETTY HAMILYA, S.Kom
NIP. 19760903 200212 2 002



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WINDA YANTI, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK PERTAMA

WINDA YANTI, S.Sos, M.Si
NIP. 19790810 200701 2 004



SEPRANEF SYAMSIR, AP.M.Si
NIP. 19740925 199502 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Tahun Anggaran : APBD-P TAHUN 2024

No.	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan koperasi dan UKM	1 Tersedianya data Jumlah Usaha Mikro	1 Jumlah Usaha Mikro	10.080 UMKM	1 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	802.937.200
		2 Terlaksananya Pembinaan Usaha Mikro	2 Jumlah UMKM yang dibina	115 UMKM	2 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	161.185.350
JUMLAH ANGGARAN						964.122.550


 KEPALA
 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
 PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI
 SPRIANEF SYAMSIR, AP. M.Si
 NIP. 19740925 199502 1 001

Dumai, September 2024
 KABID PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
 KOPERASI DAN USAHA MIKRO
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
 PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI


 WINDA YANTI, S.Pos, M.Si
 NIP. 19790810 200701 2 004



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANTON BUDI DHARMA, ST, MT.

Jabatan : KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK PERTAMA

ANTON BUDI DHARMA, ST, MT.
NIP. 19800627 200904 1 001



SEPRANEF SYAMSIR, AP.M.Si
NIP. 19740925 199502 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Tahun Anggaran : APBD-P TAHUN 2024

No.	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan kontribusi sektor Industri pada PDRB Kota Dumai	1 Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	1 Laporan	1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	80.000.000
		2 Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINias)	2 Jumlah Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan Kawasan Industri	5 Dokumen	2 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000
JUMLAH ANGGARAN						130.000.000

KEPALA



Dumai, September 2024
KABID PERINDUSTRIAN

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI

ANTON BUDI DHARMA, ST, MT.
NIP. 198006271009041001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROZA SARTIKA,A.Md.Farm

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ZULFIKAR,S.Sos., M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA

ZULFIKAR, S.Sos., M.Si
NIP.19810207 200701 1 003

PIHAK PERTAMA

ROZA SARTIKA,A.Md.Farm
NIP. 19840917 201001 2 023

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Tahun Anggaran : APBD-P TAHUN 2024

No.	Tujuan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan koperasi dan UKM	1 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.781.300
		2 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.629.838
		3 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.250.074
		4 Tersedianya Bahan Logistik Kantor	4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.974.400
		5 Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.005.730
		6 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.940.000
		7 Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	7 Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	7 Fasilitas Kunjungan Tamu	7.025.000
		8 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	411.906.700

No.	Tujuan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		9 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.370.000
		10 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.913.240
		11 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	11 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	849.361.920
JUMLAH ANGGARAN						1.554.158.202

SEKRETARIS DINAS KOPERASI, UKM
DAN PERINDUSTRIAN

ZULPILAK, S.Sos., M.Si
NIP. 19810207 200701 1 003

Dumai, September 2024
KASUBAG TATA USAHA
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

ROZA SARIWA, S.Pd, S.PM
NIP. 19840917 201001 2 023



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUHARRIAH, S.Sos

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ZULFIKAR, S.Sos., M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA

ZULFIKAR, S.Sos., M.Si
NIP. 19810207 200701 1 003

PIHAK PERTAMA

JUHARRIAH, S.Sos
NIP. 19700116 200701 2 022

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Tahun Anggaran : APBD-P TAHUN 2024

No.	Tujuan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan koperasi dan UKM	1 Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.538.185
		2 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.551.500
		3 Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.452.450
		4 Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.466.345
		5 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.444.713
		6 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.161.817.400
		7 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.695.295

No.	Tujuan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		8 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	47.876.050
		9 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.133.880
		10 Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	Pengadaan Mebel	30.796.200
		11 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.796.250
		12 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Fajaknya	1 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.000.000
		13 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertiznannya	14 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.756.050
		14 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.840.000
		15 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88.840.000
JUMLAH ANGGARAN						4.620.024.318

SEKRETARIS DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

ZULFIKAR, S.Sos., M.Si
NIP. 19610207 200701 1 003

Dumai, September 2024
KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

JUHARRIAH, S.Sos
NIP. 197001162007012022



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI WAHYUNI ANGGRAINI. Hrp. ST., M.Si

Jabatan : JF PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : WAN YETTY HAMILYA, S.Kom

Jabatan : KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA

WAN YETTY HAMILYA, S.Kom
NIP. 19760903 200212 2 002

PIHAK PERTAMA


DEWI WAHYUNI ANGGRAINI. Hrp. ST., M.Si
NIP. 197706072005012010

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Tahun Anggaran : APBD P TAHUN 2024

No. (1)	Tujuan (2)	Sasaran Kegiatan (3)	Indikator Kinerja (4)	Target (5)
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan koperasi dan UKM	Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Jumlah Koperasi yang di lakukan pengawasan/monitoring dan di evaluasi	18 koperasi
			2 Informasi data pembaharuan koperasi yang di Update tiap bulannya	12 dokumen
			3 Jumlah Koperasi yang di nilai sebagai usulan koperasi berprestasi tahun 2024	15 koperasi
		2 Terlaksananya Koperasi yang diberi Fasilitas Pendampingan Kelembagaan	1 Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan/ kunjungan bimbingan dan konseling (fasilitasi) / penyuluhan pembentukan koperasi baru maupun pembubaran	20 koperasi
			2 Jumlah / Data Koperasi yang di kirim sebagai peserta pelatihan	25 koperasi

KABID KELEMBAGAAN DAN
PENGAWASAN


WAN YETTY HAMILYA, S.Kom
NIP. 19760903 200212 2 002

FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA


DEWI WAHYUNI ANGGRAINI, H.P., ST., M.Si
NIP. 19770607 200501 2 010



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JULIANDA, S.Kp. G.M.P.H

Jabatan : JF PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : WAN YETTY HAMILYA, S.Kom

Jabatan : KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***


Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA


WAN YETTY HAMILYA, S.Kom
NIP. 19760903 200212 2 002

PIHAK PERTAMA


JULIANDA, S.Kp. G.M.P.H
NIP. 198007152000031003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
: APBD P TAHUN 2024

No. (1)	Tujuan (2)	Sasaran Kegiatan (3)	Indikator Kinerja (4)	Target (5)
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan koperasi dan UKM	1 Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Jumlah Koperasi yang di lakukan pengawasan/monitoring dan di evaluasi	18 koperasi
			2 Informasi data pembaharuan koperasi yang di Update tiap bulannya	12 dokumen
			3 Jumlah Koperasi yang di nilai sebagai usulan koperasi berprestasi tahun 2024	15 koperasi
		2 Terlaksananya Koperasi yang diberi Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan	1 Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan/ kunjungan bimbingan dan konseling (fasilitasi) / penyuluhan pembentukan koperasi baru maupun pembubaran	18 koperasi
			2 Jumlah / Data Koperasi yang di kirim sebagai peserta pelatihan	25 koperasi

KABID KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN



WAN YETTY HAMILYA, S.Kom
NIP. 19760903 200212 2 002

FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA



JULIANDA, S.Kp., G., M.P.H
NIP. 198007152000031003



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MUHAMMAD HAMZAH. S.Sos., M.Si

Jabatan : JF PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : WAN YETTY HAMILYA, S.Kom

Jabatan : KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA


WAN YETTY HAMILYA, S.Kom
NIP. 19760903 200212 2 002

PIHAK PERTAMA


H. MUHAMMAD HAMZAH. S.Sos., M.Si
NIP. 198310112003121008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

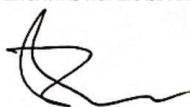
Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Tahun Anggaran : APBD P TAHUN 2024

No. (1)	Tujuan (2)	Sasaran Kegiatan (3)	Indikator Kinerja (4)	Target (5)
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan koperasi dan UKM	1 Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Informasi data pembaharuan koperasi yang di Update tiap bulannya	12 dokumen
			2 Jumlah Koperasi yang di nilai sebagai usulan koperasi berprestasi tahun 2024	10 koperasi
		2 Terlaksananya Koperasi yang diberi Fasilitas Pendampingan Kelembagaan	3 Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan/ kunjungan bimbingan dan konseling (fasilitasi) / penyuluhan pembentukan koperasi baru maupun pembubaran	13 koperasi

KABID KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN


WAN YETTY HAMILYA, S.Kom
 NIP. 19760903 200212 2 002

FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA


H. MUHAMMAD HAMZAH, S.Sos., M.Si
 NIP. 198310112003121008



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI RAMDANI, S.Pd., M.IP.

Jabatan : JF PENGEMBANG KEWIRUSAHAAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WINDA YANTI, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO


Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA


WINDA YANTI, S.Sos, M.Si
NIP. 19790810 200701 2 004

PIHAK PERTAMA


SRI RAMDANI, S.Pd., M.IP.
NIP. 19760825 200501 2 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Tahun Anggaran : APBD-P TAHUN 2024

No.	Tujuan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan koperasi dan UKM	1 Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 2 Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	1 Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 2 Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	210 Unit Usaha 30 Unit Usaha	1 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 2 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	92.176.400 75.000.000
JUMLAH ANGGARAN						167.176.400

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA
MIKRO



WINDA YANTI, S.Sps, M.Si
NIP. 19790810 200101 2 004

JF PENGEMBANG KEWIRUSAHAAN
AHLI MUDA



SRI RAMDANI, S.Pd., M.IP.
NIP. 19760825 200501 2 006



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURLAILI ZA, ST.

Jabatan : JF PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WINDA YANTI, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA

WINDA YANTI, S.Sos, M.Si
NIP. 19790810 200701 2 004

PIHAK PERTAMA


NURLAILI ZA, ST.
NIP. 19830826 201001 2 022

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN


Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Tahun Anggaran : APBD-P TAHUN 2024

No.	Tujuan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan koperasi dan UKM	1 Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	1 Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	840 Unit Usaha	1 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	219.760.800
		2 Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2 Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	200 Unit Usaha	2 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	161.185.350
JUMLAH ANGGARAN						380.946.150

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO


WINDA YANTI, S.Sos, M.Si
NIP. 19790810 200701 2 004

JF PENGEMBANG KEWIRUSAHAAN
AHLI MUDA


NURLAILI ZA, ST.
NIP. 19830826 201001 2 022



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HELMI ESA SUSANTI, SE., M.Si.

Jabatan : JF PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WINDA YANTI, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA

WINDA YANTI, S.Sos, M.Si
NIP. 19790810 200701 2 004

PIHAK PERTAMA


HELMI ESA SUSANTI, SE., M.Si.
NIP. 19821111 200904 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN


Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Tahun Anggaran : APBD-P TAHUN 2024

No.	Tujuan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan koperasi dan UKM	<p>1 Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro</p> <p>2 Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain</p>	<p>1 Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</p> <p>2 Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</p>	<p>60 Unit Usaha</p> <p>20 Unit Usaha</p>	<p>1 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro</p> <p>2 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik</p>	<p>50.000.000</p> <p>366.000.000</p>
JUMLAH ANGGARAN						416.000.000

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO


WINDA YANTI, S.Sos, M.Si
NIP. 19790814 200701 4 004

JF PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN
AHLI MUDA


HELMI ESA SUSANTI, SE., M.Si.
NIP. 19821111 200904 2 002



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIANA SUSAN SIMANJUNTAK, SE

Jabatan : JF. PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : WINDA YANTI, S.Sos., M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO USAHA Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung *Pihak Pertama*. *Pihak Kedua* akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA

WINDA YANTI, S.Sos., M.Si
NIP. 19790810 200701 2 004

PIHAK PERTAMA

DIANA SUSAN SIMANJUNTAK, SE
NIP. 19850514 201001 2 030


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran


: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
: APBD-P TAHUN 2024

No.	Tujuan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pembinaan Usaha Mikro	<p>1 Mengumpulkan dan Mengolah Data Pembinaan UMKM di Kota Dumai Tahun 2024</p> <p>2 Mempelajari Peraturan-peraturan serta Bahan-bahan lainnya mendukung Pelaksanaan Pembinaan Pelaku Usaha Mikro di Kota Dumai</p> <p>3 Membantu Pelaksanaan Pelatihan/Kegiatan Pengembangan Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro di Kota Dumai Tahun 2024</p> <p>4 Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Pembinaan Pelaku Usaha Mikro di Kota Dumai Tahun 2024</p>	<p>1 Jumlah Pengkoreksian Data Pembinaan Usaha Mikro di Kecamatan Dumai Kota Dumai Tahun 2024</p> <p>2 Jumlah Peraturan-peraturan dan bahan-bahan Pelaksanaan Pembinaan Pelaku Usaha Mikro di Kota Dumai</p> <p>3 Jumlah Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi terkait pengembangan usaha Pelaku Usaha Mikro Kota Dumai Tahun 2024</p> <p>4 Jumlah Pelaku Usaha yang dikunjungi dalam rangka Pembinaan melalui Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>12 Laporan</p> <p>1 Berkas</p> <p>5 Kegiatan</p> <p>10 Kali</p>
2	Terlaksananya Pendataan Usaha Mikro	<p>1 Menyiapkan Pengumpulan dan Pengelolaan Data serta Informasi yang berhubungan dengan Pendataan Usaha Mikro di Kecamatan Dumai Kota Dumai Tahun 2024</p>	<p>1 Jumlah Data serta Informasi yang berhubungan dengan Pendataan Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Dumai Kota Dumai Tahun 2024</p>	<p>240 data</p>

KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO


WINDA YANTI, S.Sos., M.Si
NIP. 19790310 200701 2 004

JF. PENGEMBANG KEWIRUSAHAAN
AHLI PERTAMA


DIANA SUSAN SIMANJUNTAK, SE
NIP. 19850514 201001 2 030



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DICKY AMRIZAL, ST

Jabatan : JF. PEMBINA INDUSTRI AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : ANTON BUDI DHARMA, ST, MT

Jabatan : KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA

ANTON BUDI DHARMA, ST, MT
NIP. 19800627 200904 1 001

PIHAK PERTAMA

DICKY AMRIZAL, ST
NIP. 19671026 200003 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah
 Tahun Anggaran

: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
 : TAHUN 2024

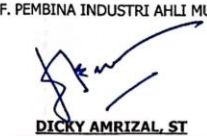
No.	Tujuan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Perusahaan Industri terkait kegiatan produksinya melalui SIINas	1 Melakukan Pendataan Perusahaan Industri Melalui Sistem SIINas	1 Data Perusahaan Industri Teraftar SIINas	1 Data
2	Peningkatan Jumlah IKM yang mendapatkan Pembinaan serta terdaftar pada SIINas	1 Melakukan Pembinaan ke IKM untuk Pendaftaran SIINas	1 IKM terdaftar SIINas	12 IKM
3	Pembinaan Terhadap Industri yang ada di Kota Dumai	1 Melakukan Sosialisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi OPD dan Pelaku Usaha di Kota Dumai	1 IKM Teraftar TKDN	20 IKM

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN



ANTON BUDI DHARMA, ST, MT
 NIP. 19800627 200904 1 001

JF. PEMBINA INDUSTRI AHLI MUDA



DICKY AMRIZAL, ST
 NIP. 19671026 200003 1 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANTON MANALU, AP, M.Si

Jabatan : JF. PEMBINA INDUSTRI AHLI MUDA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ANTON BUDI DHARMA, ST, MT

Jabatan : KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

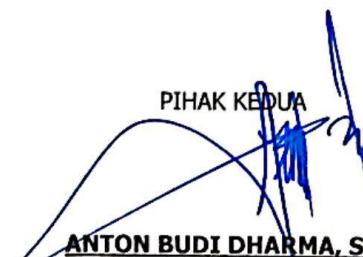
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung **Pihak Pertama**


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA


ANTON BUDI DHARMA, ST, MT
NIP. 19800627 200904 1 001

PIHAK PERTAMA


ANTON MANALU, AP, M.Si
NIP. 19751104 199412 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
: TAHUN 2024


No.	Tujuan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Perusahaan Industri terkait kegiatan produksinya melalui SIINas	1 Melakukan Pendataan Perusahaan Industri Melalui Sistem SIINas	1 Data Perusahaan Industri Terdaftar SIINas	1 Data
2	Peningkatan Jumlah IKM yang mendapatkan Pembinaan serta terdaftar pada SIINas	1 Melakukan Pembinaan ke IKM untuk Pendaftaran SIINas	1 IKM terdaftar SIINas	12 IKM
3	Pembinaan Terhadap Industri yang ada di Kota Dumai	1 Melakukan Sosialisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi OPD dan Pelaku Usaha di Kota Dumai	1 IKM Terdaftar TKDN	20 IKM

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN



ANTON BUDI DHARMA, ST, MT
NIP. 19800627 200904 1 001

JF. PEMBINA INDUSTRI AHLI MUDA



ANTON MANALU, AP, M.Si
NIP. 19751104 199412 1 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : RINI, S.Sos. M.IP
Jabatan : JF. Pembina Industri

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

N a m a : ANTON BUDI DHARMA, ST. MT
Jabatan : Ka. Bidang Perindustrian selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

ANTON BUDI DHARMA, ST, MT.
NIP. 19800627 200904 1 001

Dumai, September 2024
PIHAK PERTAMA

RINI, S.SOS, M.IP
NIP. 197502162001122002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI


Satuan Kerja Perangkat Daerah
 Tahun Anggaran

No.	Tujuan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian diam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui SIINAS yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Risk Bass Approach (OSS RBA) Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem	1 Tersedianya data Informasi Industri Kecil Menengah	1 Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian dalam Sistem Informasi Nasional (SIINAS)	4 Laporan
		2 Tersedianya data Informasi Industri Kecil Menengah	2 Jumlah data Industri Kecil Menengah dalam Sistem Informasi Nasional (SIINAS)	4 Laporan
2	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Industri kecil Menengah	1 Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang diawasi dan dilakukan pembinaan	10 Laporan
3	Peningkatan kontribusi Sektor Industri pada PDRB Kota Dumai	1 Terlaksananya Sosialisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi OPD dan Pelaku Usaha di Kota Dumai	1 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan

KA. BID. PERINDUSTRIAN


 ANTON BUDI DHARMA, ST. MT.
 NIP. 19800627 200904 1 001

JF. PEMBINA INDUSTRI


 RINI, S.SOS, M.IP
 NIP. 197502162001122002

PENGUKURAN KINERJA

Nama OPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Anggota Koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif} \times 100}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}}$	71%	67,27%	95,38%
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro dan Kecil} \times 100}{\text{Jumlah Seluruh UKM}}$	55 %	22,13%	45,45%
2.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri sebagai sektor Unggulan dalam Mendukung Perekonomian Daerah	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri} \times 100}{\text{Jumlah PDRB}}$	65,9%	61,25%	92,41%
		Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Pengrajin Yang Mendapat Bantuan Binaan Pemda Tanun} \times 100}{\text{Jumlah Kelompok Pengrajin}}$	14%	4,33%	77,03%

Pagu anggaran tahun 2024 : Rp. 7.810.120.070

Realisasi Anggaran Program Tahun 2024 : Rp. 6.979.719.604

Persentase Capaian Program Tahun 2024 : 89,37%

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai
Tahun 2024

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.174.187.520,00	5.779.002.524,00	93,60	Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian telah selesai dilaksanakan, namun karena kondisi keuangan tidak stabil mengakibatkan tunda bayar	Seluruh kegiatan yang tunda bayar, masih dalam proses reviu inspektorat. Apabila reviu telah selesai dilaksanakan, maka menunggu hasil Keputusan Wali Kota Duma	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.473.193,00	17.446.600,00	99,85			
				Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.473.193,00	17.446.600,00	99,85			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.213.388.745,00	4.060.715.826,00	96,38			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.161.817.400,00	4.024.232.226,00	96,69			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.695.295,00	0	0			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	47.876.050,00	36.483.600,00	76,20			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.138.880,00	23.082.800,00	85,05			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.138.880,00	23.082.800,00	85,05			

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	567.513.042,00	469.252.420,00	82,69	Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian telah selesai dilaksanakan, namun karena kondisi keuangan tidak stabil mengakibatkan tunda bayar	Seluruh kegiatan yang tunda bayar, masih dalam proses revidu inspektorat. Apabila revidu telah selesai dilaksanakan, maka menunggu hasil Keputusan Wali Kota Duma	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.781.300,00	6.760.600,00	99,69			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.629.838,00	68.623.400,00	99,99			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.250.074,00	15.834.950,00	74,52			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.974.400,00	15.980.000,00	63,99			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.005.730,00	17.994.800,00	99,94			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.940.000,00	5.310.000,00	59,40			
				Fasilitasi Kunjungan tamu	7.025.000,00	3.555.000,00	50,60			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	411.906.700,00	335.193.670,00	81,38			
				Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	91.592.450,00	91.450.000,00	99,84			
				Pengadaan Mebel	30.796.200,00	30.750.000,00	99,85			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	60.796.250,00	60.700.000,00	99,84			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	986.645.160,00	904.018.471,000	91,63			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.370.000,00	2.200.000,00	92,83			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.913.240,00	125.336.551,00	92,90			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	849.361.920,00	776.481.920,00	91,42			

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.436.050,00	213.036.407,00	78,78	Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian telah selesai dilaksanakan, namun karena kondisi keuangan tidak stabil mengakibatkan tunda bayar	Seluruh kegiatan yang tunda bayar, masih dalam proses reviu inspektorat. Apabila reviu telah selesai dilaksanakan, maka menunggu hasil Keputusan Wali Kota Duma	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.000.000,00	14.650.000,00	77,11			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.756.050,00	95.949.207,00	65,38			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.840.000,00	15.640.000,00	98,74			
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	88.840.000,00	86.797.200,00	97,90			
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	150.000.000,00	114.836.600,00	76,56			
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/USP Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam 1 daerah	150.000.000,00	114.836.600,00	76,56			
				Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kab/Kota	75.000.000,00	45.949.000,00	61,27			
				Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja, Keuangan dan Permodalan	75.000.000,00	68.887.600,00	91,85			
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	241.810.000,00	222.216.800,00	91,90			
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	241.810.000,00	222.216.800,00	91,90			
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	241.810.000,00	222.216.800,00	91,90			

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	100.000.000,00	90.441.512,00	90,44	Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian telah selesai dilaksanakan, namun karena kondisi keuangan tidak stabil mengakibatkan tunda bayar	Seluruh kegiatan yang tunda bayar, masih dalam proses reviu inspektorat. Apabila reviu telah selesai dilaksanakan, maka menunggu hasil Keputusan Wali Kota Duma	
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kab/Kota	100.000.000,00	90.441.512,00	90,44			
				Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	100.000.000,00	90.441.512,00	90,44			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	802.937.200,00	521.499.513,00	64,95			
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan	802.937.200,00	521.499.513,00	64,95			
				Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	50.000.000,00	2.985.000,00	5,97			
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	92.176.400,00	88.927.000,00	96,47			
				Fasilitasi Sertifikasi dan standarisasi Usaha Mikro	75.000.000,00	71.800.000,00	95,73			
				Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	366.000.000,00	163.740.353,00	44,74			
				Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	219.760.800,00	194.047.160,00	88,30			
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	161.185.350,00	122.172.300,00	75,80			
				Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	161.185.350,00	122.172.300,00	75,80			

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	161.185.350,00	122.172.300,00	75,80	Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian telah selesai dilaksanakan, namun karena kondisi keuangan tidak stabil mengakibatkan tunda bayar	Seluruh kegiatan yang tunda bayar, masih dalam proses reviu inspektorat. Apabila reviu telah selesai dilaksanakan, maka menunggu hasil Keputusan Wali Kota Duma	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	130.000.000,00	101.130.355,00	77,79	Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian telah selesai dilaksanakan, namun karena kondisi keuangan tidak stabil mengakibatkan tunda bayar	Seluruh kegiatan yang tunda bayar, masih dalam proses reviu inspektorat. Apabila reviu telah selesai dilaksanakan, maka menunggu hasil Keputusan Wali Kota Duma	
				Penyusunan dan Evaluasi rencana Pembangunan Industri kab/Kota	130.000.000,00	101.130.355,00	77,79			
				Koodinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	80.000.000,00	61.930.455,00	77,41			
				Koodinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	50.000.000,00	39.199.900,00	78,40			
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	50.000.000,00	28.420.000,00	56,84			
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi 125ndustry IUI, IPUI,IUKI dan IPKIKewenangan Kab/Kota	50.000.000,00	28.420.000,00	56,84			
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri,Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kab/Kota melalui SINas	50.000.000,00	28.420.000,00	56,84			
Total					7.810.120.070,00	6.979.719.604,00	89,37			

PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL



PENGHARGAAN TINGKAT PROVINSI



PENGHARGAAN TINGKAT KOTA DUMAI









WALIKOTA DUMAI

Piagam Penghargaan

Diberikan kepada

**KOPERASI JASA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
BINA SEJAHTERA MANDIRI**

Sebagai

HARAPAN IV

**KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT KOTA DUMAI TAHUN 2024
BERDASARKAN KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 844/868/2024**



